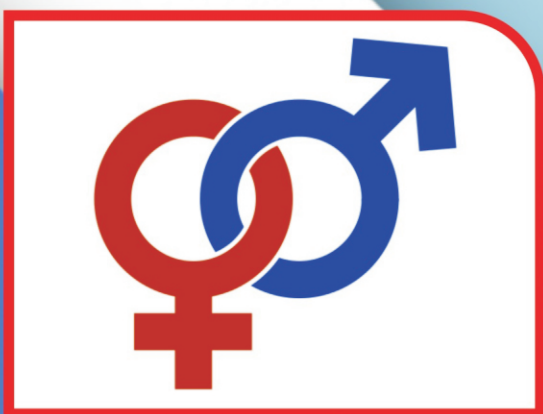




Profil Gender

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2019



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Data pilah gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberi gambaran secara perspektif mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Pembangunan yang Responsif Gender.

Tersusunnya buku Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berkat dukungan dari semua OPD yang telah memberikan kontribusi data dan merupakan wujud dari kerjasama yang baik antara OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga lembaga – lembaga vertikal lainnya yang ada di Purbalingga.

Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati kami sampaikan rasa terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan saran dari berbagai pihak demi sempurnanya penyusunan buku ini. Dan Semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Purbalingga.

Purbalingga, November 2020

**KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA**

RADITYA WIDAYAKA, AP
Pembina Utama Muda
NIP 19750619 199006 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	4
1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data.....	5
1.5 Teknik Analisis Data	5
1.6 Input	5
1.7 Output.....	6
1.8 Hasil yang Diinginkan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA	7
2.1 Kondisi Geografis	7
2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga	8
2.3 Peran DINSOSDALDUKKBP3A dalam Pembuatan Data Pilah Gender	12
BAB III KEPENDUDUKAN.....	15
3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	15
3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	18
3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk.....	19
BAB IV KESEHATAN.....	23
4.1 Kondisi Kehamilan Ibu.....	24
4.2 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.....	28
a) Pelayanan Antenatal	28
b) Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan	31
c) Pelayanan Ibu Nifas	33
d) Ibu Nifas Mendapat Vitamin A.....	35

e) Penanganan Komplikasi Kebidanan	37
f) Penanganan Komplikasi Neonatal	39
g) Penolongan Kelahiran Anak Terakhir	41
4.3 Angka Kematian Anak	43
a) Angka Kematian Neonatal	45
b) Angka Kematian Bayi (AKB)	46
c) Angka Kematian Anak Balita	48
4.4 Angka Harapan Hidup	49
4.5 Keluhan Kesehatan	50
4.6 Tenaga Kesehatan	51
BAB V KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA	53
5.1 Kondisi Keluarga	54
5.1.1 Jumlah Rumah Tangga	54
5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga	55
5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan	58
5.2 Keluarga Berencana	60
BAB VI PENDIDIKAN	66
6.1 Partisipasi Sekolah	66
6.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	69
6.3 Partisipasi Berdasarkan Kelompok Umur	69
6.4 Partisipasi dalam Kejar Paket	72
BAB VII KETENAGAKERJAAN	74
7.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan	74
7.2 Status Pekerjaan	76
7.3 Lapangan Usaha Utama	77
7.4 Jumlah Jam kerja	79
7.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka	80
BAB VIII POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK	86
8.1 Politik dan Legislatif	86
8.2 Pemerintahan Kabupaten	89
8.3 Pemerintahan Desa	93
8.4 Kepolisian	95

8.5 Yudikatif.....	96
BAB IX KEKERASAN BERBASIS GENDER	99
BAB X KESIMPULAN	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk dan rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	15
3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	17
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	18
3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	21
4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	28
4.2 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	29
4.3 Persalinan Ditolong oleh NAKES Tahun 2019	32
4.4 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019	34
4.5 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019.....	36
4.6 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.	38
4.7 Penanganan Komplikasi Neonatal per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	40
4.8 Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	42
4.9 Jumlah Kematian Neonatal Per kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	45
4.10 Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	47
4.11 Jumlah Kematian Anak Balita Per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	48
4.12 Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	50

4.13	Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	51
4.14	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	52
5.1	Rumah Tangga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	55
5.2	Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	56
5.3	Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	57
5.4	Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	58
5.5	Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	59
5.6	Umur dan Kesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	60
5.7	Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	61
6.1	APM, APK dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	69
6.2	Persentase Penduduk Usia 10 t ahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	70
6.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	71
6.4	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga 2019	72
6.5	Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	73
7.1	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	76

7.2	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	77
7.3	Jumlah Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama	79
7.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama	80
7.5	Kondisi Ketenagakerjaan dilihat dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	81
7.6	Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	82
7.7	Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	83
7.8	Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	84
7.9	Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	85
8.1	Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	87
8.2	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	87
8.3	Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	88
8.4	Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	89
8.5	Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	90

8.6	Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	91
8.7	Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	93
8.8	Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	94
8.9	Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	95
8.10	Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2019....	96
8.11	Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	96
8.12	Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	97
9.1	Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	101
9.2	Jenis kasus yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019	102
9.3	Kategori Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2019	103
9.4	Kategori Korban Kasus yang ditangani Tim Harapan 2019.....	104
9.5	Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019	105
9.6	Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	106
9.7	Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019.....	107
9.8	Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019.....	108
9.9	Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2019	109
9.10	Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019	110

9.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019	110
--	-----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019	17
3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	22
4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-1 di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019.	30
4.2. Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kab. Purbalingga Tahun 2019.....	31
4.3. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	33
4.4. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	35
4.5. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2019	37
4.6. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	39
4.7. Cakupan Penangan Komplikasi Neonatal Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	41
4.8. Penolong Kelahiran Anak Akhir Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	43
4.9. Jumlah Kematian Neonatal Per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	46
4.10 Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	47
4.11 Jumlah kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019.....	49

4.12	Grafik Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	52
5.1	Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.	57
5.2	Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.....	57
5.3	Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	59
5.4	Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	62
5.5	Kepesertaan KB Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	62
9.1	Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019	102
9.2	Umur korban kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu gender masih akan terus mengemuka selama masih adanya perbedaan peran dan fungsi social antara laki – laki dan perempuan. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan atau *diskriminasi* gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, social, masyarakat, budaya, maupun negara. Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukan dengan masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan Oleh karena itu perlu upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;

Pengarusutamaan **Gender** atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari

seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender maka ditetapkan Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian diatur dalam Permendagri no 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbarui dengan Permendagri no 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman PUG di daerah. Dalam pelaksanaan PUG ada 7 pra syarat yang harus di penuhi yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya, data terpilah, analisa dan partisipasi masyarakat.

Mendasari prasyarat yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender salah satunya adalah tersedianya data pilah gender, yaitu data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin yang mencakup semua bidang pembangunan. Tersusunnya data pilah gender mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan gender, sehingga dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran kinerja suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pemimpin/pengambil kebijakan dalam

menyusun rencana kegiatan dan mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Semua kabupaten setiap tahun selalu membuat data Kabupaten dalam Angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Di samping itu, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga membuat data yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, dalam kenyataannya belum semua data yang ditampilkan telah terpilah gender. Permasalahan lainnya, informasi yang diberikan oleh masing-masing instansi pada umumnya masih terbatas, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang tersebut. Untuk itulah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga berusaha mengumpulkan dan menyatukan data pilah gender tahun 2019 yang telah ada menjadi sebuah buku “Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019”.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah untuk menyajikan data terpilah sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan,

sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas. Melalui data pilah gender ini akan dapat dilihat ada tidaknya kesenjangan/gap gender yang mungkin terjadi di suatu bidang. Informasi kesenjangan gender ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (khususnya organisasi-organisasi perangkat daerah yang terkait) dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil yang ada. Dalam situasi di mana pada umumnya alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka ketepatan jenis program dan kegiatan serta sasaran kegiatannya sangatlah dibutuhkan. Salah satu pendukungnya adalah adanya data yang terpilah gender.

Dibuatnya Profil Gender 2019 ini sekaligus diharapkan akan lebih memasyarakatkan konsep gender baik di kalangan para pembuat kebijakan publik beserta para pelaksananya maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang tidak tepat tentang gender. Gender masih sering dipahami sebagai persamaan dari jenis kelamin (*sex*). Gender juga masih sering dipersamakan dengan “perempuan” saja.

1.3 Sasaran

Penggalan data gender yang menyangkut semua isu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG di wilayah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data

Penulisan Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 ini disajikan secara deskriptif yang diperkuat dengan tabel dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah: (1) data dari masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan format data pilah gender Provinsi yang dihimpun Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA (DINSOSDALDUKKBP3A), (2) data sekunder yang terdapat dalam buku “Purbalingga dalam Angka 2020” (BPS Kabupaten Purbalingga, 2020) serta (3) “Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019” (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2019).

1.5 Teknik Analisis Data

Data dari tiap-tiap bidang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel berperspektif gender, yakni dengan menampilkan data laki-laki dan perempuan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan pada bidang-bidang tersebut.

1.6 Input

- a. Merupakan kelanjutan dari buku data terpilah gender dari tahun sebelumnya.
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

1.7 Output

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu.
- b. Mengidentifikasikan masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki -laki yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman perempuan dan laki – laki.
- c. Buku profil gender dan anak tahun 2019.

1.8 Hasil yang Diinginkan

- a. Buku Profil Gender Tahun 2019
- b. Data gender untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga sektoral dalam penyelenggaraan data gender
- d. Base data gender dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 ha). Sebagian besar wilayahnya adalah berupa sawah (27,27 persen), perkampungan (21,18 persen), tegalan (21,42 persen) serta hutan (14,57 persen). Sebagian lainnya digunakan untuk kebun campur (6,53 persen), perkebunan (1,05 persen), perikanan (0,28 persen) dan lain-lain (4,47 persen) (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Wilayah ini terbagi lagi menjadi 1.546 Rukun Warga (RW) dan 5.059 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga. Dari 18 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Rembang yakni 9.159 ha, Karangreja (7.449 ha) dan Karangmoncol (6.027 ha). Adapun kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah yakni 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan

Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan sila ke 5 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui

peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah disusun pula Misi Purbalingga yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021 dirumuskan dalam tujuh poin sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan

paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.
6. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_229_2016.pdf)

2.3 Peran DINSOSDALDUKKBP3A dalam Pembuatan Data Pilah

Gender

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKBP3A adalah salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Keberadaan lembaga ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Organisasi perangkat daerah ini memiliki lima Bidang yakni: (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, (2) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, (3) Bidang Pengendalian Penduduk, (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DINSOSDALDUKKBP3A bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu kewenangannya tampak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini membawahi dua Seksi yakni Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak. Salah satu kewenangan yang ditanganinya adalah dalam pembuatan data pilah gender yang melekat pada Sub-

Urusan Sistem Data Gender dan Anak yaitu Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

Sehubungan dengan kewenangan pembuatan data pilah gender tersebut, setiap tahun DINSOSDALDUKKBP3A selalu menyusun data Profil Gender Kabupaten Purbalingga. Profil Gender ini menggambarkan kondisi masyarakat laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan usaha ekonomi serta politik dan kebijakan publik. Data yang digunakan berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah yang berjumlah 23 organisasi yang datanya khusus dikumpulkan guna pelaksanaan pembuatan Profil Gender ini. Pengumpulan datanya biasanya dilakukan pada pertengahan tahun melalui pertemuan Forum Data Gender. Di samping itu, digunakan pula data yang bersumber dari buku yang sudah terbit seperti “Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2020” (BPS, 2020) dan “Profil Kesehatan Purbalingga 2019” (DKK Kabupaten Purbalingga, 2019).

Dengan menampilkan data pilah gender Kabupaten, akan dapat dilihat ada tidaknya kesenjangan gender di antara laki-laki dan perempuan di bidang-bidang tersebut di tingkat kabupaten. Dengan demikian, diharapkan akan dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, kegiatan di bidang tersebut yang sedang dijalankan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk tahun

berikutnya. Penyempurnaan ini dapat menyangkut jenis kebijakan, program, kegiatannya, kelompok sasaran maupun teknik/metode yang digunakan.

BAB III

KEPENDUDUKAN

3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Purbalingga tahun 2019 adalah sebanyak 1.003.246 jiwa dengan komposisi jenis kelamin yakni 508.036 jiwa penduduk laki-laki dan 495.210 jiwa penduduk perempuan (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga, 2019). Dengan demikian persentase penduduk laki laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk Perempuan yakni 50,64 persen. Apabila diukur dengan rasio jenis kelamin, besarnya adalah 1,03. Rasio tertinggi adalah di Kecamatan Karangjambu (1,07), disusul dengan Kecamatan Karanganyar (1,05), Karangmoncol (1,05) dan Kecamatan Rembang (1,05) (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga, 2019). Kondisi ini ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Rasio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kemangkon	32.509	50,26	32.174	49,74	64.683	1,01
2	Bukateja	39.675	50,27	39.241	49,73	78.916	1,01
3	Kejobong	25.997	50,46	25.521	49,54	51.518	1,02
4	Kaligondang	33.395	50,34	32.946	49,66	66.341	1,01
5	Purbalingga	29.277	49,47	29.909	50,53	59.186	0,98
6	Kalimanah	28.847	50,45	28.328	49,55	57.175	1,02
7	Kutasari	32.784	50,84	31.704	49,16	64.488	1,03
8	Mrebet	39.574	50,70	38.485	49,30	78.059	1,03

9	Bobotsari	27.794	50,47	27.273	49,53	55.067	1,02
10	Karangreja	22.993	51,03	22.067	48,97	45.060	1,04
11	Karanganyar	21.055	51,20	20.067	48,80	41.122	1,05
12	Karangmoncol	29.995	51,21	28.574	48,79	58.569	1,05
13	Rembang	35.234	51,20	33.585	48,80	68.819	1,05
14	Bojongsari	31.963	51,09	30.603	48,91	62.566	1,04
15	Padamara	22.901	50,32	22.611	49,68	45.512	1,01
16	Pengadegan	20.722	50,26	20.504	49,74	41.226	1,01
17	Karangjambu	14.122	51,74	13.172	48,26	27.294	1,07
18	Kertanegara	19.199	51,00	18.446	49,00	37.645	1,04
Jumlah		508.036	50,64	495.210	49,36	1.003.246	1,03

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2020

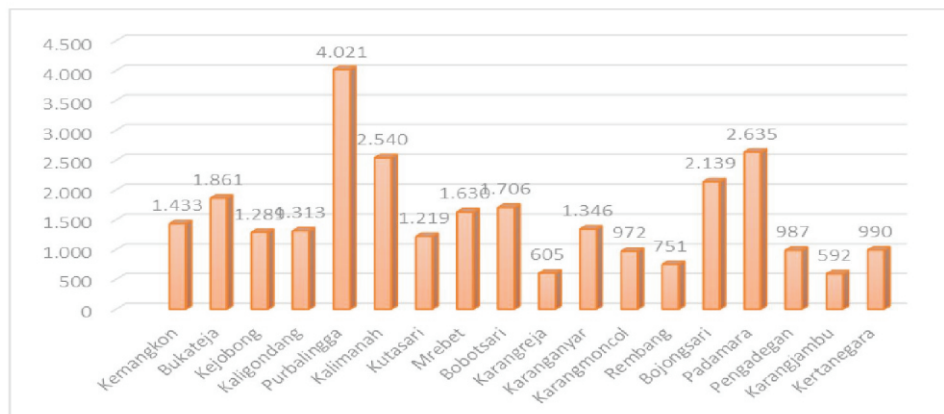
Kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 1.290 orang per kilometer persegi. Wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Purbalingga yakni sebesar 4.021 orang per kilometer persegi. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini adalah ibu kota kabupaten dengan tingkat keramaian tinggi dan ketersediaan fasilitas yang lengkap. Wilayah padat lainnya adalah Kecamatan Padamara (2.635) dan Kalimanah (2,540). Adapun tingkat kepadatan terendah ada di Kecamatan Karangjambu (592) dan Karangreja (605). Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang cukup jauh dari ibukota kabupaten. Data tentang hal ini ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Kecamatan	JML Penduduk	Luas Wilayah (km)	Kepadatan Penduduk per km2
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	64.683	45,13	1.433
2	Bukateja	78.916	42,40	1.861
3	Kejobong	51.518	39,98	1.289
4	Kaligondang	66.341	50,54	1.313
5	Purbalingga	59.186	14,72	4.021
6	Kalimanah	57.175	22,51	2.540
7	Kutasari	64.488	52,90	1.219
8	Mrebet	78.059	47,89	1.630
9	Bobotsari	55.067	32,28	1.706
10	Karangreja	45.060	74,49	605
11	Karanganyar	41.122	30,55	1.346
12	Karangmoncol	58.569	60,27	972
13	Rembang	68.819	91,59	751
14	Bojongsari	62.566	29,25	2.139
15	Padamara	45.512	17,27	2.635
16	Pengadegan	41.226	41,75	987
17	Karangjambu	27.294	46,09	592
18	Kertanegara	37.645	38,03	990
JUMLAH		1.003.246	777,64	1.290

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019



3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dilihat dari kelompok umur, secara keseluruhan persentase terbanyak penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga adalah pada kelompok umur 65 tahun ke atas yakni sebesar 9,23 persen. Persentase terbanyak kedua adalah pada kelompok umur 35-39 tahun yakni 8,16 persen yang disusul dengan kelompok umur 5-9 tahun sebesar 8,04 persen. Adapun jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada kelompok umur 60-64 tahun yakni sebesar 4,16 persen. Dari kondisi ini tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah pada usia 65 tahun ke atas.

Sementara itu, apabila diperbandingkan jumlah laki-laki dan perempuan, hampir semua kelompok umur lebih banyak penduduk laki-laki meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan hanya pada kelompok umur 50-64 tahun. Adapun pada kelompok-kelompok umur lainnya, jumlah perempuan lebih banyak. Data selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	36.884	51,69	34.466	48,31	71.350	7,11
2	5-9	41.661	51,65	39.002	48,35	80.663	8,04
3	10-14	41.083	51,60	38.535	48,40	79.618	7,94
4	15-19	32.188	50,45	31.611	49,55	63.799	6,36

5	20-24	40.440	50,87	39.049	49,13	79.489	7,92
6	25-29	40.516	51,33	38.424	48,67	78.940	7,87
7	30-34	38.538	51,32	36.560	48,68	75.098	7,49
8	35-39	41.358	50,55	40.466	49,45	81.824	8,16
9	40-44	38.114	50,50	37.362	49,50	75.476	7,52
10	45-49	34.212	50,18	33.960	49,82	68.172	6,80
11	50-54	29.427	48,83	30.836	51,17	60.263	6,01
12	55-59	26.273	48,44	27.967	51,56	54.240	5,41
13	60-64	20.444	49,04	21.241	50,96	41.685	4,16
14	65 +	46.898	50,63	45.731	49,37	92.629	9,23
Jumlah		508.036	50,64	495.210	49,36	1.003.246	100,00%

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2020

3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif

untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Misal rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

(BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=95>).

Di Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2019 adalah hampir sepertiga dari total penduduk (32,3 persen). Kebanyakan dari mereka adalah penduduk usia 0-14 tahun yang jumlahnya sebesar 23,09 persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 9,23 persen dari total penduduk. Dengan demikian, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan adalah 47,76 yang artinya setiap 100 orang penduduk yang produktif (diasumsikan bekerja) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum/tidak produktif. Apabila dikaji lebih jauh, di kalangan penduduk laki-laki rasio ketergantungannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada laki-laki rasio ketergantungannya adalah sebesar 48,76 yang berarti 100 orang penduduk laki-laki yang produktif harus menanggung 48 penduduk laki-laki yang belum/tidak produktif. Adapun pada penduduk perempuan lebih kecil yakni 46,73 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan yang produktif, menanggung 47 penduduk perempuan yang belum/tidak produktif.

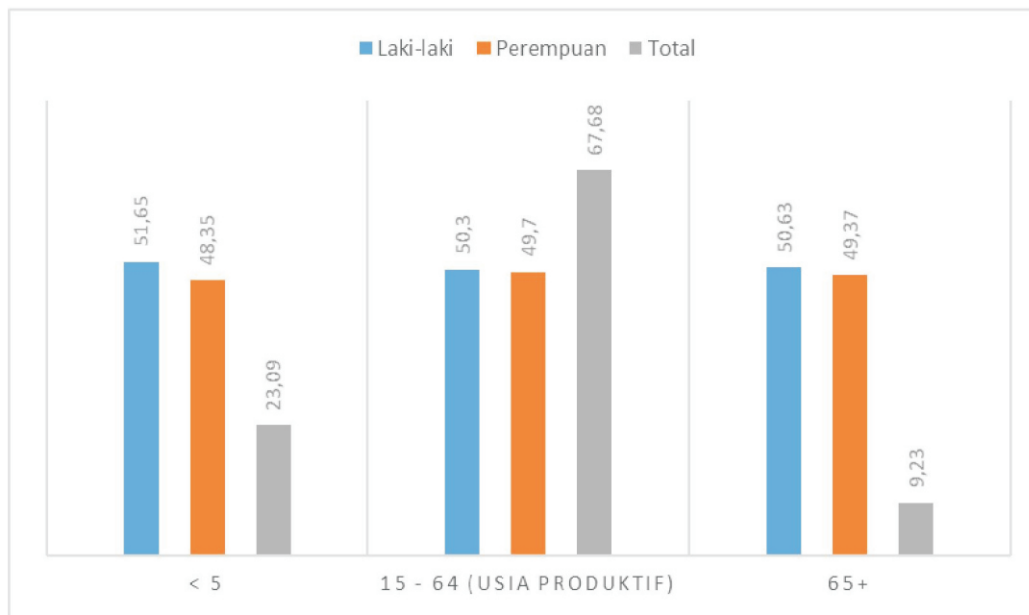
Tabel 3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Klpk umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 15	119.628	51,65	112.003	48,35	231.631	23,09
15 - 64	341.510	50,30	337.476	49,70	678.986	67,68
65+	46.898	50,63	45.731	49,37	92.629	9,23
Jumlah	508.036		495.210		1.003.246	

Sumber : diolah dari Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2020

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu 67,68 persen dari jumlah penduduk. Dimana di usia produktif komposisi laki – laki dan perempuan hampir seimbang namun sedikit lebih banyak adalah laki laki 50,30 persen sedangkan perempuan 49,70 persen. Dominannya usia produktif ini menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-produktif tua (65 tahun ke atas). Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang kenenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak.

Gambar 3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



BAB IV

KESEHATAN

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat, dan usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Mengkaji derajat kesehatan biasanya dimulai dengan melihat angka kesakitan, kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya. Kesenjangan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan sangat terkait dengan terciptanya kesetaraan dalam bidang pelayanan kesehatan dan program kesehatan. Kondisi kesehatan perempuan penting untuk dikaji disebabkan oleh peran kodrati mereka yakni melahirkan dan menyusui yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Bila ibu sehat, maka akan melahirkan bayi yang sehat pula. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, penolong persalinan, Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, Imunisasi TT pada ibu hamil, Ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan

laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup.

4.1 Kondisi Kehamilan Ibu

Kondisi pada saat hamil sangat mempengaruhi kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Salah satu kebutuhan ibu hamil adalah zat besi atau tablet Fe. Tablet Fe atau zat besi adalah suatu suplemen panambah darah yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Kebutuhan atau dosis zat besi dari setiap tingkat umur dan jenis kelamin berbeda-beda. Wanita membutuhkan zat besi lebih tinggi dari laki-laki karena terjadi menstruasi dengan perdarahan sebanyak 50 – 80 cc setiap bulan dan kehilangan zat besi sebanyak 30 – 40 mgr (<https://anesmg.wordpress.com/2014/05/10/table-fe-zat-besi/>).

Salah satu program untuk meningkatkan kondisi kehamilan ibu adalah dengan memberikan tablet Fe. Hal ini terkait dengan kondisi masih banyaknya ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK). Menurut Depkes RI (1999), KEK pada ibu hamil adalah kekurangan gizi pada ibu hamil yang berlangsung lama (beberapa bulan atau tahun).

Ibu yang mengalami KEK selama hamil akan menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun janin. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bila bayi lahir dengan kondisi BBLR mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Untuk mencegah resiko KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan wanita usia subur sudah harus mempunyai gizi yang baik, misalnya dengan LILA (Lingkar Lengan Atas) tidak kurang dari 23,5 cm. Apabila LILA ibu sebelum hamil kurang dari angka tersebut, sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak beresiko melahirkan BBLR (Lubis, 2003).

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga terdapat 16.353 ibu hamil. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 20 persen (3.271 ibu hamil) yang diperkirakan mengalami komplikasi Resiko Tinggi (Resti).

Ibu hamil resiko tinggi merupakan suatu masa dimana ibu tersebut dapat mengalami berbagai resiko ketika hamil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor - faktor yang seringkali menjadi suatu penyebab utama resiko tinggi yang sering kita dengar dengan istilah 4 T yaitu usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat hamil, jarak kemamilan yang terlalu dekat dan kemamilan yang terlalu banyak (sering), faktor lainnya yaitu memiliki riwayat kelainan saat melakukan persalinan atau pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan yang berhubungan dengan ibu hamil resiko tinggi tidak hanya berdampak buruk pada sang ibu saja akan tetapi juga berdampak buruk bagi si calon bayi yang dikandungnya (Idtesis.com).

Agar proses kelahiran dapat berjalan lancar dan selamat baik bagi ibu maupun bayinya, maka keadaan kehamilan ibu harus selalu dipantau melalui pemeriksaan berkala minimal 4 kali dengan ketentuan:

- a. Satu kali kunjungan pada trimester pertama.
- b. Satu kali kunjungan pada trimester kedua.
- c. Dua kali kunjungan pada trimester ketiga.

Penetapan standar 10 T yaitu Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan, Pemeriksaan Tekanan Darah, Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Puncak Uteri), Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT), Pemberian Tablet Zat Besi, Tetapkan Status Gizi, Tes Laboratorium (Rutin dan Khusus), Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), Tatalaksana Kasus, Temu Wicara Persiapan Rujukan,

harus dipenuhi dengan minimal 4 kali kunjungan masa kehamilan. Berdasarkan keteraturan kunjungan ibu hamil ini, cakupan pelayanan antenatal dapat dievaluasi yang dikenal dengan K1 dan K4. Dalam upaya menekan AKI dan AKB Dinas Kesehatan mengadakan Program Kelas Ibu Hamil di setiap Polindes yang diperuntukan ibu hamil dan pendamping (suami atau orang tua ibu hamil) dan diadakan secara berkala.

Untuk gambaran kondisi ibu hamil di Kabupaten Purbalingga ditahun 2019, semua ibu hamil melakukan kunjungan K1 yaitu 100 persen, akan tetapi yang sampai pada kunjungan K4 hanya 96 persen, yang mendapat Imunisasi Td2+ sebesar 73,9 persen dan mendapatkan Tambah Darah 90 sebesar 89 persen.

Berbagai kondisi yang menunjukkan masih belum optimalnya kesehatan ibu hamil tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan resiko kematian. Selama tahun 2019 terdapat 12 kasus Angka Kematian Ibu (AKI). Dan kematian merata di masa hamil 4 kasus, melahirkan 4 kasus dan nifas 4 kasus. Adapun penyebab kematian sebagian besar karena pendarahan yaitu sebanyak 7 orang, hipertensi 3 orang dan gangguan lainnya 2 orang. Kondisinya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Bidang/Indikator	Jumlah	%
1.	Jumlah Ibu Hamil	16.353	
2.	Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi (RESTI)	32.71	20
3.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	14.562	89,05
4.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT		73,9
5.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K1	16.353	100,00
6.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K4	15.691	95,95
7.	Angka Kematian Ibu (AKI)	81,2	
8.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil	4	0,33
9.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	4	0,33
10.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Nifas	4	0,33
11.	Jumlah Persalinan yang ditolong Nakes	14.761	99,9
12.	Jumlah Persalinan yang ditolong non Nakes	20	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga 2020

4.2 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

a) Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4.

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan (sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan

dua kali pada trimester ketiga). Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan ibu hamil. Berikut ini gambaran cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2019).

Tabel 4.2 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL				
		JUMLAH	K1		K4	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Kemangkon	948	948	100,00	929	98,00
2	Bukateja	1305	1305	100,00	1.258	96,40
3	Kejobong	783	783	100,00	762	97,32
4	Pengadegan	652	652	100,00	615	94,33
5	Kaligondang	1014	1014	100,00	971	95,76
6	Purbalingga	845	845	100,00	807	95,50
7	Kalimanah	853	853	100,00	834	97,77
8	Padamara	692	692	100,00	679	98,12
9	Kutasari	1199	1199	100,00	1.166	97,25
10	Bojongsari	1107	1107	100,00	1.050	94,85
11	Mrebet	1240	1240	100,00	1.211	97,66
12	Bobotsari	831	831	100,00	799	96,15
13	Karangreja	890	890	100,00	844	94,83
14	Karangjambu	448	448	100,00	412	91,96
15	Karanganyar	689	689	100,00	668	96,95
16	Kertanegara	626	626	100,00	592	94,57
17	Karangmoncol	1064	1064	100,00	1.008	94,74
18	Rembang	1167	1167	100,00	1.086	93,06
JUMLAH		16.353	16.353	100,00	15.691	95,95

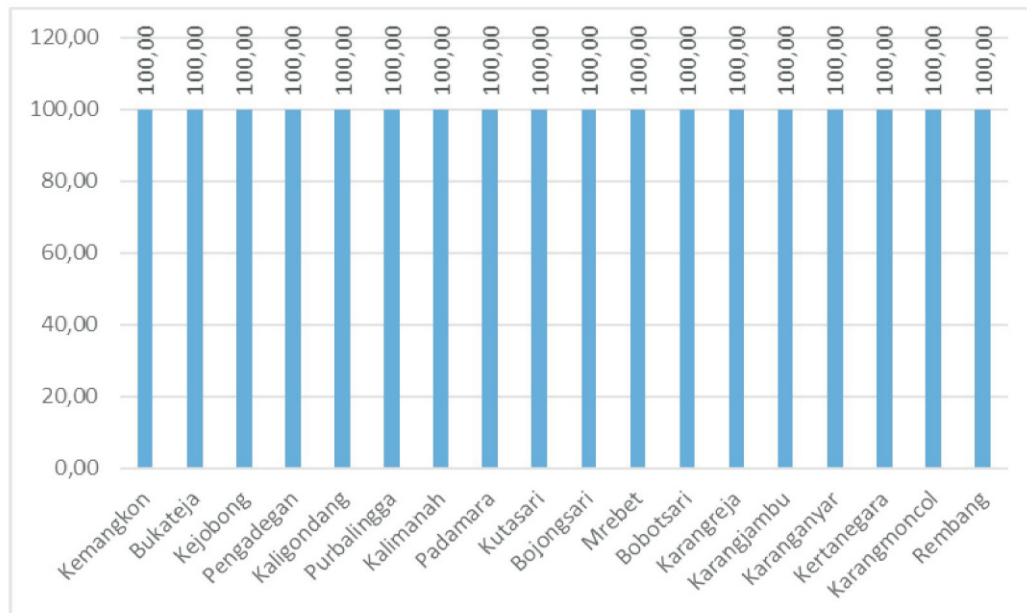
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-1

Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan atau *Antenatal Care (ANC)* meliputi Penimbangan Berat Badan, Pemeriksaan kehamilan,

Pemberian Tablet Besi, Pemberian Imunisasi TT dan Konsultasi. Cakupan K1 ibu hamil di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sudah mencapai 100 persen. Semua Puskesmas cakupannya sudah 100 persen sehingga sudah di atas target 95,00 persen (DKK Kabupaten Purbalingga, 2019).

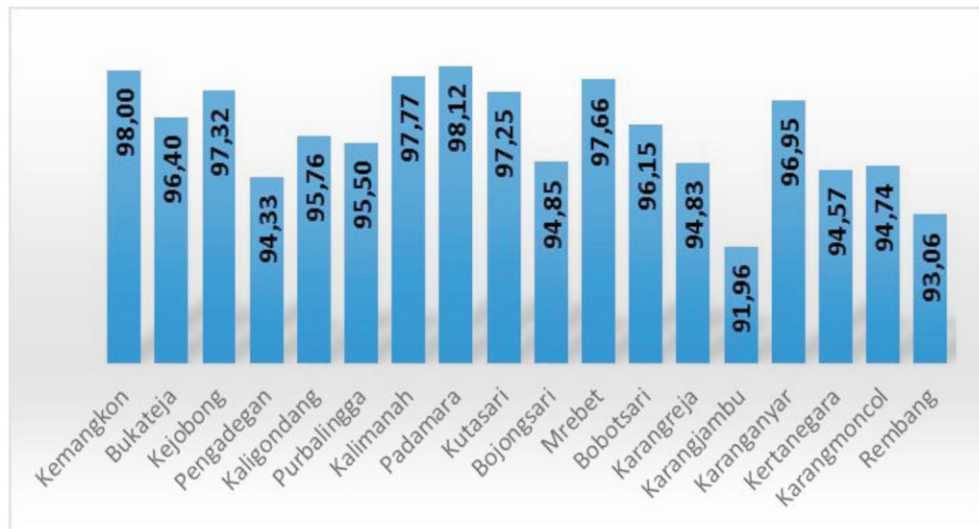
Gambar 4.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-1 di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019.



2) Cakupan Kunjungan K4 – ibu hamil

Cakupan K4 di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 mencapai 96 persen dengan capaian cakupan tertinggi di Kecamatan Padamara sebesar 98,1 Persen dan terendah Puskesmas Rembang sebesar 90,98 persen. Jika dibandingkan dengan capaian cakupan K4 tahun 2018 sebesar 95,83 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen.

Gambar 4.2. Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kab. Purbalingga Tahun 2019



b) Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini disebabkan pertolongan persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan. Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah. Berikut data

pertolongan persalinan oleh nakes Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Tabel 4.3 Persalinan Ditolong oleh NAKES Tahun 2019

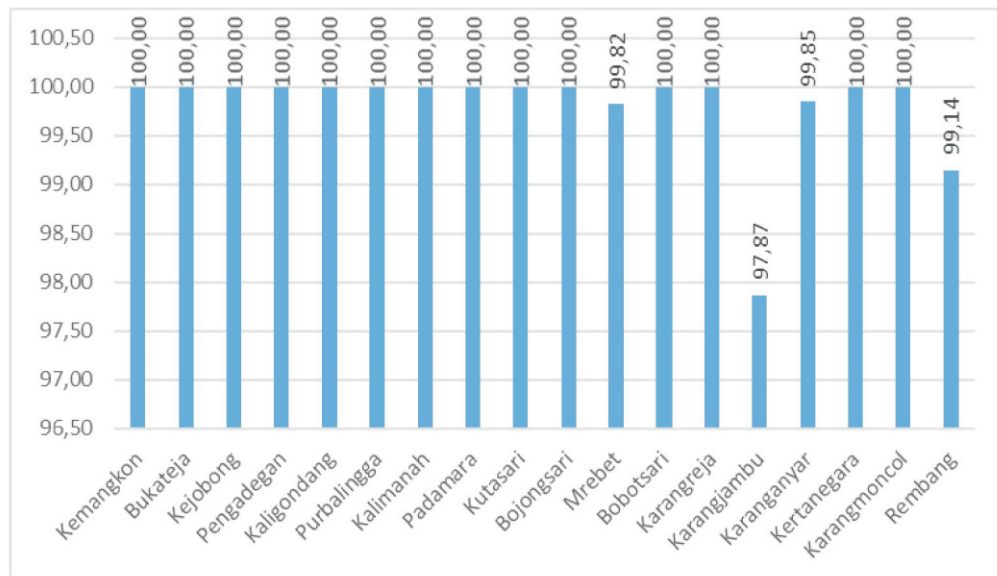
NO	KECAMATAN	JUMLAH	Persalinan Di Tolong NAKES	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	843	843	100,00
2	Bukateja	1.162	1.162	100,00
3	Kejobong	734	734	100,00
4	Pengadegan	566	566	100,00
5	Kaligondang	939	939	100,00
6	Purbalingga	754	754	100,00
7	Kalimanah	782	782	100,00
8	Padamara	662	662	100,00
9	Kutasari	1.078	1.078	100,00
10	Bojongsari	994	994	100,00
11	Mrebet	1.118	1.116	99,82
12	Bobotsari	746	746	100,00
13	Karangreja	795	795	100,00
14	Karangjambu	376	368	97,87
15	Karanganyar	665	664	99,85
16	Kertanegara	549	549	100,00
17	Karangmoncol	968	968	100,00
18	Rembang	1.050	1.041	99,14
JUMLAH		14.781	14.761	99,86

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2020

Cakupan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 99,86 persen dan dibanding dengan cakupan tahun 2018 sebesar 99,75 persen persen mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen. Cakupan terendah sebesar 97,9 persen dicapai Kecamatan Karangjambu kemudian disusul oleh

Kecamatan Rembang, Mrebet dan Karanganyar sedang kecamatan lainnya mencapai 100%.

Gambar 4.3. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, dilaksanakan pelatihan untuk tenaga Bidan seperti: pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal (PPGDON), manajemen asfiksia bayi baru lahir, manajemen bayi dengan berat lahir rendah, dll.

c) Pelayanan Ibu Nifas

Kunjungan ibu nifas merupakan salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kunjungan ibu nifas atau yang sering disebut dengan istilah KF. Berdasarkan Frekuensi KF dibagi menjadi KF1 yaitu kunjungan 6 jam – 48 Jam, KF2

kunjungan 4 hari – 28 hari, dan KF 3 hari 29 hari – 42 hari. Tujuan dari kunjungan ibu nifas yaitu untuk memantau kesehatan ibu nifas dan memberi bimbingan konseling. Adapun gambaran ibu nifas yang mendapatkan kunjungan sampai dengan KF3 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019

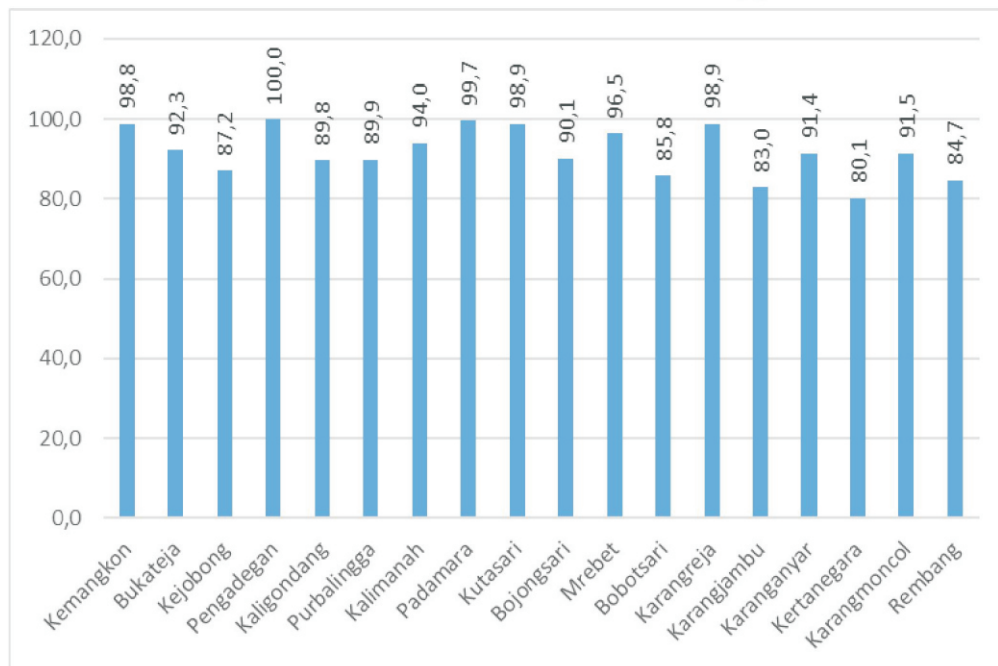
NO	KECAMATAN	JUMLAH	IBU NIFAS MENDAPATKAN PELAYANAN S/D KF3	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	843	833,0	98,81
2	Bukateja	1.162	1.073,0	92,34
3	Kejobong	734	640,0	87,19
4	Pengadegan	566	566,0	100,00
5	Kaligondang	939	843,0	89,78
6	Purbalingga	754	678,0	89,92
7	Kalimanah	782	735,0	93,99
8	Padamara	662	660,0	99,70
9	Kutasari	1.078	1.066,0	98,89
10	Bojongsari	994	896,0	90,14
11	Mrebet	1.118	1.079,0	96,51
12	Bobotsari	746	640,0	85,79
13	Karangreja	795	786,0	98,87
14	Karangjambu	376	312,0	82,98
15	Karanganyar	665	608,0	91,43
16	Kertanegara	549	440,0	80,15
17	Karangmoncol	968	886,0	91,53
18	Rembang	1.050	889,0	84,67
JUMLAH		14.781	13.630	92,21

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2020

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas sampai dengan 29 – 42 hr (KF3) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 92,21 persen dan dibanding dengan cakupan tahun 2018

sebesar 94,08 persen mengalami penurunan sebesar 1,87 persen. Cakupan terendah sebesar 80,15 persen dicapai oleh Kecamatan Kertanegara dan yang tertinggi sebesar 100,0 persen dicapai oleh Kecamatan Pengadegan.

Gambar 4.4. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Menurut Kecamatan di Kab. Purbalingga Tahun 2019



d) Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Suplementasi vitamin A merupakan salah satu program pemberian kapsul vitamin A bagi usia 6 - 59 bulan dan ibu nifas. Pemberian suplemen berupa vitamin A salah satu upaya untuk menekan AKI maupun AKB. Manfaat pemberian vitamin A untuk ibu nifas adalah selain mencegah kebutaan juga untuk mempercepat proses pemulihan saat melahirkan dan memperoleh kualitas ASI sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi.

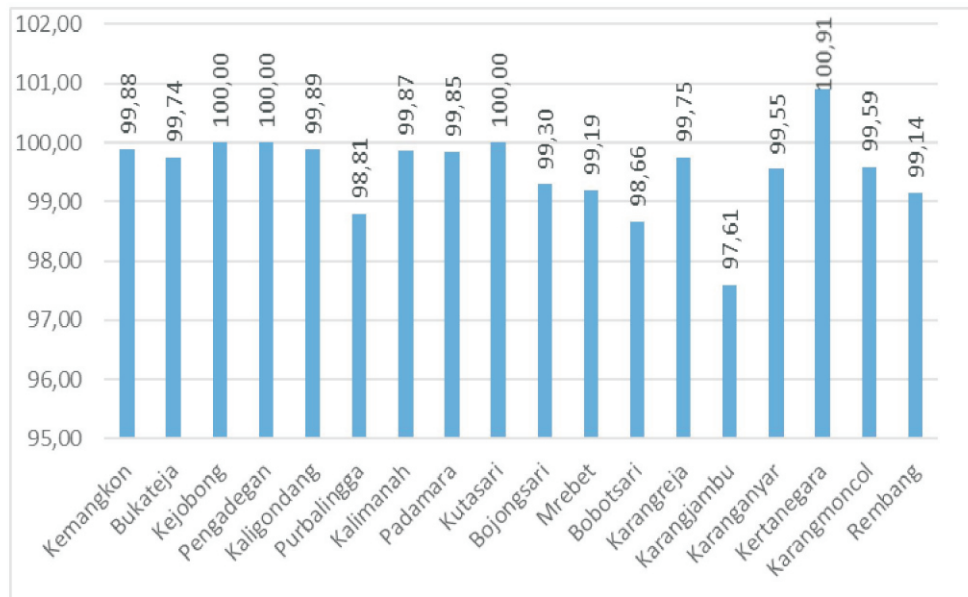
Tabel 4.5 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019.

NO	KECAMATAN	JUMLAH	IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%
1	Kemangkon	843	842	99,88
2	Bukateja	1.162	1.159	99,74
3	Kejobong	734	734	100,00
4	Pengadegan	566	566	100,00
5	Kaligondang	939	938	99,89
6	Purbalingga	754	745	98,81
7	Kalimanah	782	781	99,87
8	Padamara	662	661	99,85
9	Kutasari	1.078	1.078	100,00
10	Bojongsari	994	987	99,30
11	Mrebet	1.118	1.109	99,19
12	Bobotsari	746	736	98,66
13	Karangreja	795	793	99,75
14	Karangjambu	376	367	97,61
15	Karanganyar	665	662	99,55
16	Kertanegara	549	554	100,91
17	Karangmoncol	968	964	99,59
18	Rembang	1.050	1.041	99,14
JUMLAH		14.781	14.717	99,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2020

Cakupan pelayanan ibu nifas mendapat Vitamin A Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 99,6% dan dibanding dengan cakupan tahun 2018 sebesar 98,25% mengalami peningkatan sebesar 1,35%. Cakupan terendah sebesar 97,6% dicapai Kecamatan Karangjambu dan yang tertinggi sebesar 100,90% dicapai oleh Kecamatan Kertanegara.

Gambar 4.5. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2019



e) Penanganan Komplikasi Kebidanan

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan puskesmas, beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus resiko tinggi (resti) atau mengalami komplikasi kebidanan dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Selain faktor umur ibu hamil juga faktor penyakit bawaan dari ibu hamil seperti darah tinggi dan lainnya. Gambaran ibu hamil dengan resiko tinggi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

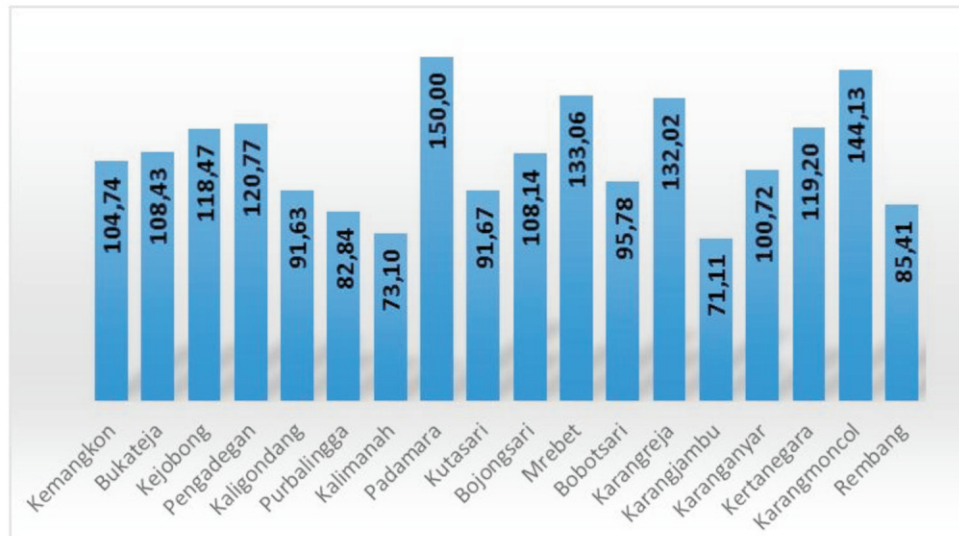
Tabel 4.6 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	%
1	Kemangkon	948	190	199	104,74
2	Bukateja	1305	261	283	108,43
3	Kejobong	783	157	186	118,47
4	Pengadegan	652	130	157	120,77
5	Kaligondang	1014	203	186	91,63
6	Purbalingga	845	169	140	82,84
7	Kalimanah	853	171	125	73,10
8	Padamara	692	138	207	150,00
9	Kutasari	1199	240	220	91,67
10	Bojongsari	1107	221	239	108,14
11	Mrebet	1240	248	330	133,06
12	Bobotsari	831	166	159	95,78
13	Karangreja	890	178	235	132,02
14	Karangjambu	448	90	64	71,11
15	Karanganyar	689	138	139	100,72
16	Kertanegara	626	125	149	119,20
17	Karangmoncol	1064	213	307	144,13
18	Rembang	1167	233	199	85,41
	JUMLAH	16.353	3.271	3.524	107,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Perkiraan sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebanyak 3.271 kasus (20 persen dari jumlah ibu hamil), sedangkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan sebanyak 3.524 kasus (107,7 persen dari angka perkiraan). Pada dasarnya ibu hamil dengan komplikasi kebidanan telah mendapat penanganan seluruhnya 100 persen. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan terendah di Kecamatan Karangjambu 71,11 persen dan tertinggi di Kecamatan Padamara yaitu 150,0 persen.

Gambar 4.6. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



f) Penanganan Komplikasi Neonatal

Komplikasi Neonatal yaitu neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian termasuk bayi BBLR (berat bayi < 2500 gr). Penanganan komplikasi neonatal yaitu neonatal dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

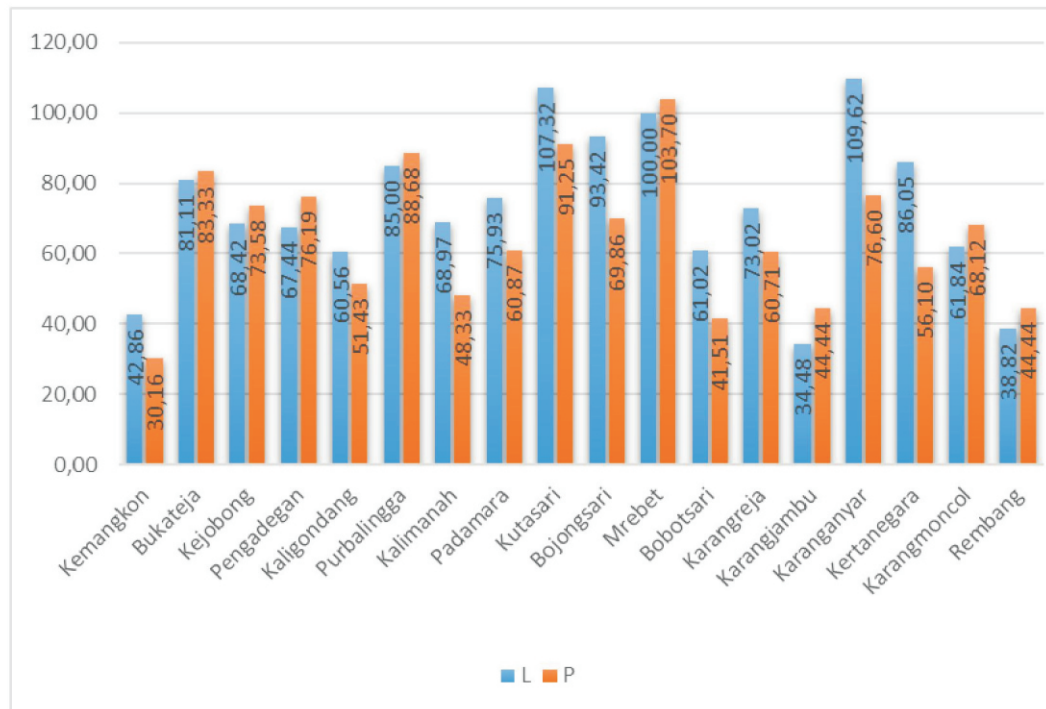
Tabel 4.7 Penanganan Komplikasi Neonatal per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

NO	KECAMATAN	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL					
					L		P		L + P	
		L	P	L + P	JML	%	JML	%	JML	%
1	Kemangkon	63	63	126	27	42,86	19	30,16	46	36,51
2	Bukateja	90	84	174	73	81,11	70	83,33	143	82,18
3	Kejobong	57	53	110	39	68,42	39	73,58	78	70,91
4	Pengadegan	43	42	85	29	67,44	32	76,19	61	71,76
5	Kaligondang	71	70	141	43	60,56	36	51,43	79	56,03
6	Purbalingga	60	53	113	51	85,00	47	88,68	98	86,73
7	Kalimanah	58	60	118	40	68,97	29	48,33	69	58,47
8	Padamara	54	46	100	41	75,93	28	60,87	69	69,00
9	Kutasari	82	80	162	88	107,32	73	91,25	161	99,38
10	Bojongsari	76	73	149	71	93,42	51	69,86	122	81,88
11	Mrebet	86	81	167	86	100,00	84	103,70	170	101,80
12	Bobotsari	59	53	112	36	61,02	22	41,51	58	51,79
13	Karangreja	63	56	119	46	73,02	34	60,71	80	67,23
14	Karangjambu	29	27	56	10	34,48	12	44,44	22	39,29
15	Karanganyar	52	47	99	57	109,62	36	76,60	93	93,94
16	Kertanegara	43	41	84	37	86,05	23	56,10	60	71,43
17	Karangmoncol	76	69	145	47	61,84	47	68,12	94	64,83
18	Rembang	85	72	157	33	38,82	32	44,44	65	41,40
	JUMLAH	1147	1070	2217	854	74,46	714	66,73	1568	70,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Cakupan komplikasi Neonatal yang ditangani Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 70,73 persen dan dibanding dengan cakupan tahun 2018 sebesar 71,23 persen mengalami penurunan sebesar 0,50 persen. Cakupan terendah sebesar 36,5 persen dicapai Kecamatan Kemangkon dan yang tertinggi sebesar 101,8 persen dicapai oleh Kecamatan Mrebet. Pada dasarnya semua komplikasi Neonatal sudah tertangani atau 100%.

Gambar 4.7. Cakupan Penangan Komplikasi Neonatal Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



g) Penolong Terakhir Kelahiran Anak

Keselamatan bayi juga dapat ditentukan oleh tenaga penolong saat kelahiran. Penolong kelahiran adalah orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan dan bidan, sedangkan yang termasuk bukan tenaga kesehatan adalah dukun (baik yang terlatih maupun tidak terlatih). Dapat terjadi seorang ibu yang akan melahirkan ditolong lebih dari satu orang penolong kelahiran. Misalnya, pada awal persalinannya ia ditolong oleh dukun. Karena

terjadi masalah, maka ia dibawa ke bidan. Dalam kasus ini berarti ada dua penolong kelahiran yakni dukun dan bidan. Dalam uraian berikut ini yang dimaksud penolong kelahiran adalah tenaga penolong kelahiran yang terakhir membantu proses kelahiran seorang ibu. Penolong kelahiran secara langsung sangat mempengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak pada tahun-tahun selanjutnya pasca kelahiran. Hal ini juga sekaligus akan mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal. Gambaran Penolong Kelahiran Anak Akhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

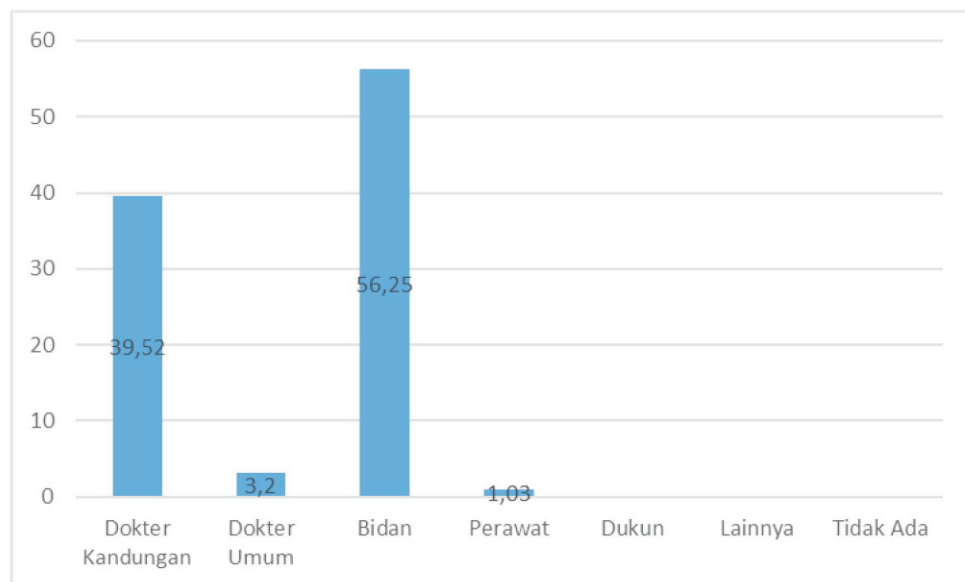
Penolong Kelahiran Terakhir	Tahun 2019
1	2
Dokter Kandungan	39,52
Dokter Umum	3,2
Bidan	56,25
Perawat	1,03
Dukun	
Lainnya	
Tidak Ada	
PURBALINGGA	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

Hasil Susenas 2018 di Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa mayoritas penolong kelahiran anak terakhir di kalangan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 2 tahun lalu atau kurang telah melahirkan anak lahir hidup adalah

tenaga bidan (56,25 persen). Penolong kelahiran lainnya yang banyak digunakan adalah dokter kandungan (39,52 persen). Dan sisanya ditolong oleh tenaga kesehatan perawat dan dokter umum. Untuk penolong kelahiran terakhir dengan dukun bayi ditahun 2029 sudah tidak ditemukan di Kabupaten Purbalingga (BPS Kabupaten Purbalingga, 2020).

Gambar 4.8. Penolong Kelahiran Anak Akhir Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



4.3 Angka Kematian Pada Anak

Salah satu risiko terberat kelahiran yang tidak ditolong tenaga kesehatan adalah kematian. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Adapun Angka Kematian Neonatal yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia sebelum 28 hari dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu angka yang menunjukkan

banyaknya kematian bayi usia sebelum 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sedangkan Angka Kematian Balita yaitu Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). (BPS, <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=3&th=2012>). Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, 1985 dalam sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=80). Adapun

gambaran angka kematian di Kabupaten Purbalingga Sebagai berikut :

a) Angka Kematian Neonatal

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 bahwa Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 4,1 (61 Kasus) per 1.000 Kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2018 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 5,19 (76 kasus) per 1.000 Kelahiran hidup. Berikut tabel jumlah kematian neonatal per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2019.

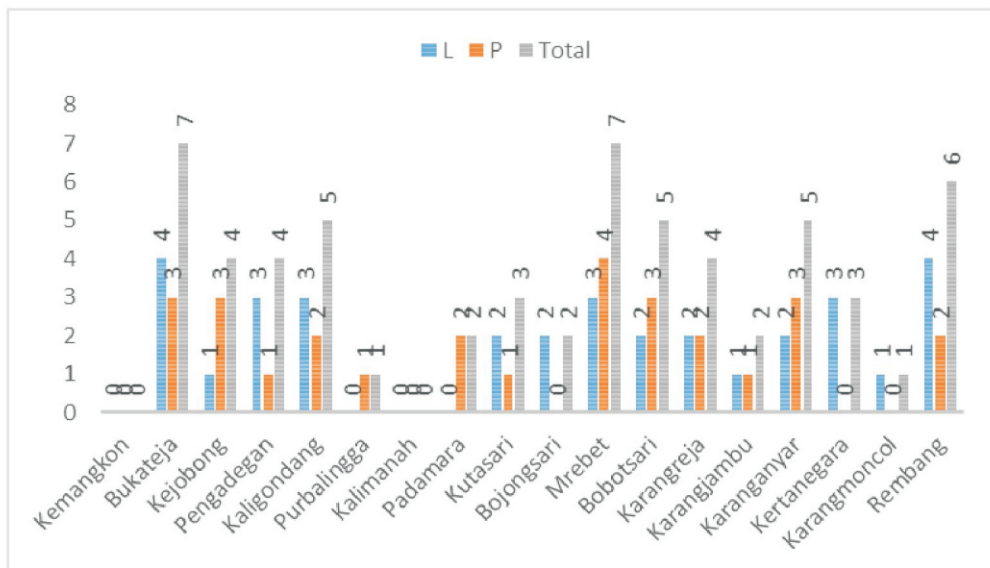
Tabel 4.9 Jumlah Kematian Neonatal Per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Kematian Neonatal		
	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemangkon	0	0	0
Bukateja	4	3	7
Kejobong	1	3	4
Pengadegan	3	1	4
Kaligondang	3	2	5
Purbalingga	0	1	1
Kalimanah	0	0	0
Padamara	0	2	2
Kutasari	2	1	3
Bojongsari	2	0	2
Mrebet	3	4	7
Bobotsari	2	3	5
Karangreja	2	2	4
Karangjambu	1	1	2
Karanganyar	2	3	5
Kertanegara	3	0	3
Karangmoncol	1	0	1
Rembang	4	2	6
Jumlah	33	28	61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Angka Kematian Neonatal Tahun 2019 sejumlah 61 Kasus dan terbanyak di Kecamatan Bukateja dan Mrebet sebanyak 7 kasus, dan tidak ada kasus kematian sama sekali di Kecamatan Kemangkon dan Kalimanah.

Gambar 4.9. Jumlah Kematian Neonatal Per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 bahwa Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 7,58 (112 Kasus) per 1.000 Kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2018 AKB mengalami peningkatan dari 7,51 (110 kasus) per 1.000 Kelahiran hidup. Berikut tabel jumlah kematian bayi per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2019.

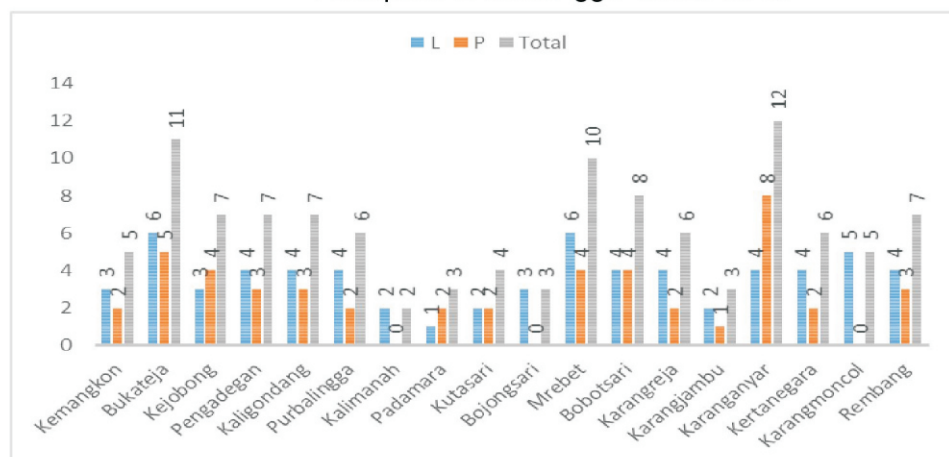
Tabel 4.10 Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi		
	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemangkon	3	2	5
Bukateja	6	5	11
Kejobong	3	4	7
Pengadegan	4	3	7
Kaligondang	4	3	7
Purbalingga	4	2	6
Kalimanah	2	0	2
Padamara	1	2	3
Kutasari	2	2	4
Bojongsari	3	0	3
Mrebet	6	4	10
Bobotsari	4	4	8
Karangreja	4	2	6
Karangjambu	2	1	3
Karanganyar	4	8	12
Kertanegara	4	2	6
Karangmoncol	5	0	5
Rembang	4	3	7
Jumlah	65	47	112

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2020

Jumlah kasus kematian bayi terbanyak di Kecamatan Karanganyar yaitu sebanyak 12 kasus kemudian disusul Kecamatan Bukateja dan Mrebet sedangkan terendah di Kecamatan Kalimanah yang hanya 2 kasus kematian bayi.

Gambar 4.10. Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



c) Angka Kematian Anak Balita

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 bahwa Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 1,56 (23 Kasus) per 1.000 Kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2018 AKBA mengalami penurunan dari 1,77 (26 kasus) per 1.000 Kelahiran hidup. Berikut tabel jumlah kematian anak balita per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2019.

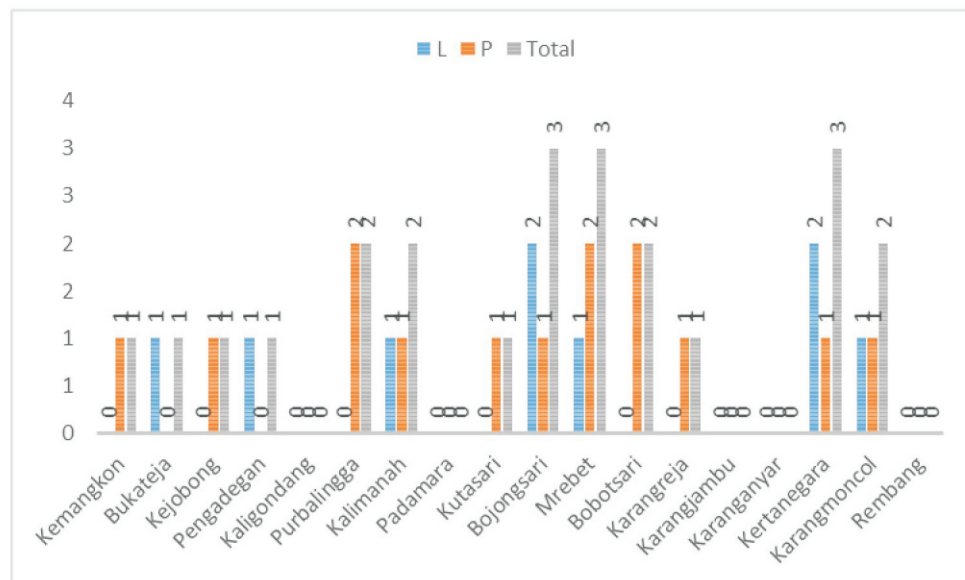
Tabel 4.11 Jumlah Kematian Anak Balita Per Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Kematian Anak Balita		
	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemangkon	0	1	1
Bukateja	1	0	1
Kejobong	0	1	1
Pengadegan	1	0	1
Kaligondang	0	0	0
Purbalingga	0	2	2
Kalimanah	1	1	2
Padamara	0	0	0
Kutasari	0	1	1
Bojongsari	2	1	3
Mrebet	1	2	3
Bobotsari	0	2	2
Karangreja	0	1	1
Karangjambu	0	0	0
Karanganyar	0	0	0
Kertanegara	2	1	3
Karangmoncol	1	1	2
Rembang	0	0	0
JUMLAH	9	14	23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Jumlah kasus kematian anak balita terbanyak sejumlah 3 kasus kematian yaitu di Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Kertanegara, sedangkan zero kasus kematian anak balita di Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Padamara, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Rembang.

Gambar 4.11 Jumlah kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2019



4.4 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan

Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (<http://sirua.bps.go.id/index/php?r=indikator/view&id=48>).

Tabel 4.12 Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019

NO	Kabupaten	Angka Harapan Hidup 2019 (Tahun)		Angka Harapan Hidup 2018 (Tahun)	
		L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Purbalingga	71,06	74,87	71,02	74,83

Sumber : BPS Prov Jateng 2020

Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami kenaikan dari Tahun 2018 untuk Angka Harapan Hidup Laki Laki naik 0,04 sedangkan Angka Harapan Hidup Perempuan naik 0,04. Angka Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi sebesar 3,81 tahun dibandingkan Angka Harapan Hidup Laki Laki.

4.5 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain (<http://sirusa.bps.go.id/sirusa2012/index.php?r=variabel/view&id=314>)

Tabel 4.13 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

NO	Kabupaten	Angka Keluhan Kesehatan 2019 (Tahun)			Angka Keluhan Kesehatan 2018 (Tahun)		
		L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Purbalingga	41,12	45,66	43,43	34,76	37,77	36,29

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2020

Prosentase Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga ditahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 baik laki laki maupun perempuan. Untuk Prosentase Keluhan Kesehatan pada perempuan lebih tinggi 4,54 persen dari laki laki.

4.6 Tenaga Kesehatan

Salah satu penunjang keberhasilan program kesehatan adalah tenaga kesehatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan (www.hukumonline.com/pusatdata/.../lt5450b859e4e6).

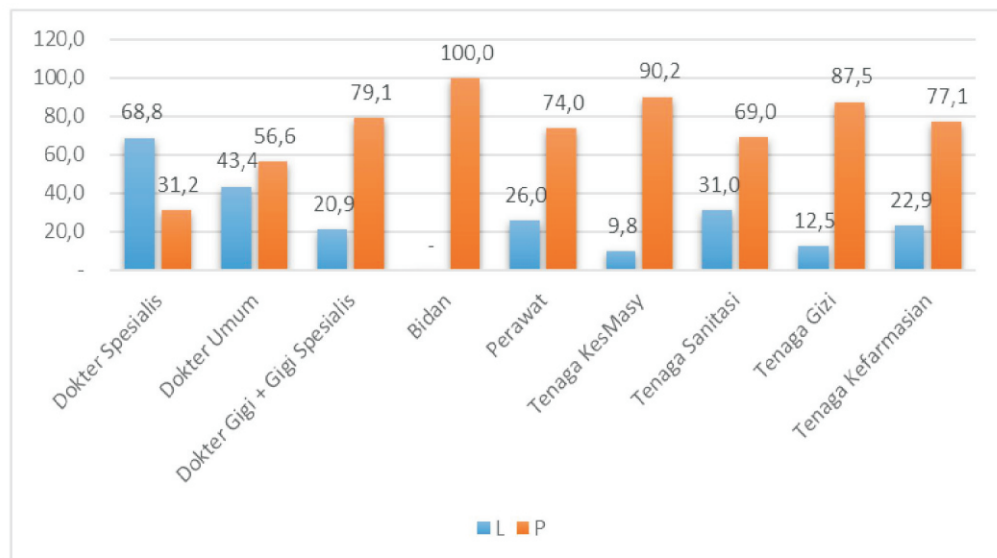
Tabel 4.14 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019

NO	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan				
		TOTAL	L	%	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokter Spesialis	125	86	68,8	39	31,2
2	Dokter Umum	182	79	43,4	103	56,6
3	Dokter Gigi + Gigi Spesialis	43	9	20,9	34	79,1
4	Bidan	566		-	566	100,0
5	Perawat	1.371	357	26,0	1.014	74,0
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	4	9,8	37	90,2
7	Tenaga Sanitasi	42	13	31,0	29	69,0
8	Tenaga Gizi	56	7	12,5	49	87,5
9	Tenaga Kefarmasian	157	36	22,9	121	77,1
	JUMLAH	2.583	591	22,9	1.992	77,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2020

Untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga secara total masih di dominasi perempuan. Dari 9 jenis Tenaga Kesehatan hanya satu jenis tenaga kesehatan yang secara prosentase laki laki lebih besar dari perempuan yaitu tenaga kesehatan Dokter Spesialis sebesar 68,8 persen.

Gambar 4.12 Grafik Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



BAB V

KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena keluarga adalah inti dari masyarakat, maka salah satu upaya peningkatan kualitas masyarakat adalah dengan mewujudkan keluarga berkualitas. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini digambarkan kondisi keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dilihat dari berbagai aspek (jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, kesempatan memperoleh kredit mikro serta jumlah jiwa dalam keluarga).

Di samping itu, digambarkan pula kondisi keluarga dilihat dari aspek Keluarga Berencana. Data ini menyangkut jumlah Wanita Usia Subur (WUS) perkelompok umur kesertaan dalam program KB serta jenis alat kontrasepsi yang digunakan.

Data yang dipakai adalah “Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Keluarga Kabupaten Purbalingga Tahun 2019” (DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019).

5.1 Kondisi Keluarga

5.1.1 Jumlah Rumah Tangga

Dalam buku ini merujuk pada pengertian Haviland (2003) yang menyatakan bahwa rumah tangga dapat terdiri dari keluarga tunggal atau sekelompok orang. Artinya, dalam satu rumah tangga dimungkinkan terdiri dari beberapa keluarga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Keluarga (KK).

Dari hasil pendataan keluarga bulan Oktober – Desember 2019 oleh DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga diketahui terdapat 237.238 rumah tangga dan 306.592 KK. Hal ini berarti ada beberapa rumah tangga yang terdiri lebih dari satu keluarga, atau terdiri dari beberapa keluarga. Dari 306.592 KK terdapat 38.639 KK perempuan (12,60 persen) dan 267.953 KK (87,40 persen) KK laki-laki. Dengan demikian, rasio rata rata KK perempuan dibanding laki-laki adalah 1 : 7. Adanya KK perempuan ini dimungkinkan terkait dengan status perkawinan mereka.

Tabel 5.1 Rumah Tangga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Rumah Tangga					237.238	
	Jumlah Kepala	267.953	87,40	38.639	12,60	306.592	
2	Keluarga (KK)						
	KK menurut status						
3	perkawinan:						
	a. kawin					258.414	84,28
	b. janda/ duda					48.178	15,71

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga

Dari sejumlah anggota keluarga yang ada termasuk Kepala Keluarga, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu 50,66 persen sedang perempuan 49,34 persen. Dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari 3,22 jiwa. Dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, maka dapat diperkirakan bahwa rata-rata keluarga mempunyai satu anak. Hal ini didukung data bahwa rata-rata balita dalam satu keluarga adalah 0,25 anak. Apabila diperbandingkan dengan jumlah WUS yang ada, maka rata-rata balita terhadap jumlah WUS adalah sebesar 0,29 anak.

Dilihat dari komposisi umur, sejumlah anggota keluarga yang ada (termasuk KK), 54,40 persen termasuk kategori umur produktif (22-59 tahun). Kelompok terbanyak berikutnya adalah penduduk usia sekolah yakni 7-15 tahun sebesar 15,91 persen.

Tabel 5.2 Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jiwa dlm kelg (termasuk KK):	500.142	50.66	487.186	49.34	987.329	
2	Rata-rata jiwa dalam keluarga					3.22	
3	Rata-rata balita dalam keluarga					0.25	
4	Rata-rata balita terhadap WUS					0.29	
5	Jumlah anggota keluarga:						
	a. 0-1 tahun					17.214	1,75
	b. 1-5 tahun					58.946	5,97
	c. 5-6 tahun					24.322	2,46
	d. 7-15 tahun					157.085	15,91
	e. 6-21 tahun					93.474	9,47
	f. 22-59 tahun					537.153	54,40
	g. 60+ tahun					99.134	10,04

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

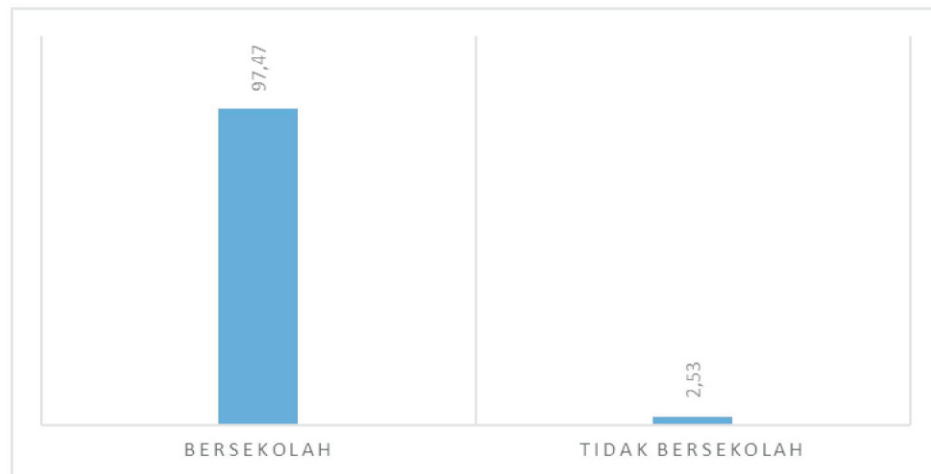
Jumlah penduduk dengan usia wajib belajar 9 tahun (7 – 15 tahun) yaitu 157.085 terdiri dari 153.112 (97,47 persen) anak sekolah dan 3.973 (2,53 persen) anak tidak sekolah. Dari 153.112 anak sekolah sebanyak 79.330 (51.81 persen) anak laki – laki dan 73.782 (48,19 persen) anak perempuan. Sementara dari jumlah 3.973 anak tidak sekolah sebanyak 2.528 (63,63 persen) anak laki – laki dan 1.445 (36,37 persen) anak perempuan.

Tabel 5.3 Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga tahun 2019

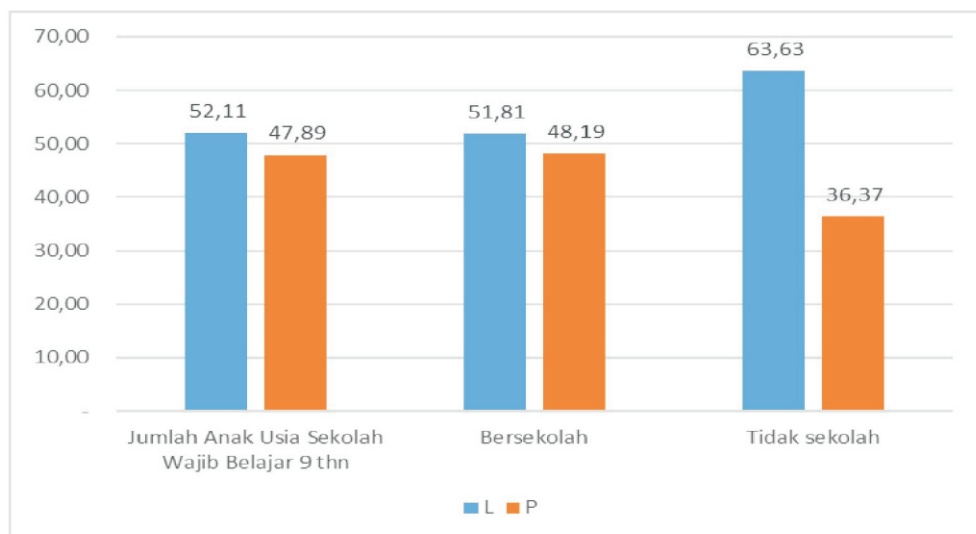
No	Keterangan	Total	%	Laki - Laki	%	Perempuan	%
1	Jumlah Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun	157.085		81.858	52,11	75.227	47,89
2	- Anak usia wajib belajar 9 thn yang bersekolah	153.112	97,47	79.330	51,81	73.782	48,19
3	- Anak usia wajib belajar 9 thn tidak bersekolah	3.973	2,53	2.528	63,63	1.445	36,37

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga 2019

Gambar 5.1 Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



Gambar 5.2 Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 pada umumnya masih rendah. Kebanyakan dari mereka hanya tamat SD dan SLTP (64,25 persen). Bahkan 12,65 persennya tidak tamat SD. Hanya 18,46 persen saja yang tamat SLTA dan 4,64 persen yang tamat Akademik/Perguruan Tinggi. Kondisi ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tidak semua Kepala Keluarga mempunyai pekerjaan. Terdapat 11,40 persen Kepala Keluarga yang tidak bekerja. Hal ini pula yang dimungkinkan membuat hanya sedikit dari mereka yang pernah mendapat kredit Mikro atau bantuan usaha (17,81 persen).

Tabel 5.4 Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	Tingkat pendidikan:		
	a. tidak tamat SD	38.780	12,65
	b. tamat SD & SLTP	196.992	64,25
	c. tamat SLTA	56.582	18,46
	d. tamat Akademi/ PT	14.238	4,64
2	KK menurut status pekerjaan:		
	a. bekerja	271.636	88,60
	b. tidak bekerja	34.956	11,40
	Mendapat kredit Mikro atau bantuan usaha	54.614	17,81

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan pekerjaan tersebut dapat tergambar dari kondisi keluarga dilihat

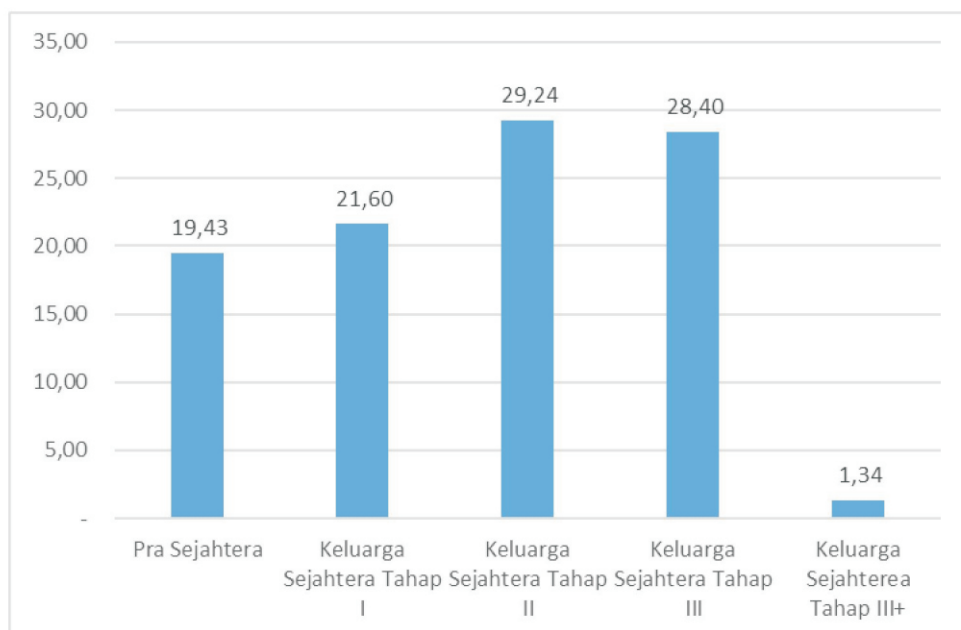
dari tahapan kesejahteraannya. Pada tahun 2019 lebih dari sepertiga KK di Kabupaten Purbalingga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Hanya ada sekitar seperempat bagian saja dari seluruh KK yang masuk kategori Sejahtera III dan III+. Kondisi terlihat dari table berikut ini.

Tabel 5.5 Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	a. Pra Sejahtera	59.564	19,43
	b. Keluarga Sejahtera Tahap I	66.209	21,60
	c. Keluarga Sejahtera Tahap II	89.653	29,24
	d. Keluarga Sejahtera Tahap III	87.071	28,40
	e. Keluarga Sejahtera Tahap III+	4.095	1,34

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Gambar 5.3 Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.



5.2 Keluarga Berencana

Didesentralisasikannya program ini, maka menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan program ini di wilayah. Salah satu kegiatan Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan jumlah akseptor KB. Akseptor atau peserta KB adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Data akhir tahun 2019 terdapat 190.647 PUS yang berarti sekitar 62,18 persen dari total keluarga. Dari jumlah ini, lebih dari separohnya atau 70,48 persen adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Diketahui pula masih terdapat sekitar 1,94 persen dari mereka yang berusia kurang dari 20 tahun. Dari sejumlah PUS tersebut, sebagian besar adalah mereka yang menjadi peserta KB. Pelayanan KB mereka peroleh baik di tempat pelayanan milik Pemerintah maupun swasta.

Tabel 5.6 Umur dan Kesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	%
	(1)	(2)	(3)
1	Jumlah PUS	190.647	
	a. < 20 tahun	3.703	1,94
	b. 20 - 29 tahun	52.582	27,58
	c. > 29 tahun	134.362	70,47
2	Kesertaan ber-KB		
	a. peserta KB	146.794	76,99
	b. bukan peserta KB	43.853	23,01

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga, 2019

Metode penggunaan alat kontrasepsi ada dua yaitu metode Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan metode Non MKJP yaitu bukan Jangka Panjang. Alat kontrasepsi yang termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOW, MOP dan Implan sedangkan Non MKJP yaitu pil, kondom dan suntik. Hampir semua peserta KB di Kabupaten Purbalingga adalah kaum perempuan dan hanya 5 persen yang laki-laki. Kebanyakan PUS ini (56,5 persen) memilih menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang sifatnya jangka pendek berupa suntikan. Dan disusul terbanyak kedua penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS adalah implan dan sisanya adalah mereka yang menggunakan kontrasepsi berupa PIL, IUD maupun MOW. Data selengkapnya terlampir berikut ini.

Tabel 5.7 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Metode Kontrasepsi	Jenis Kelamin		Jumlah	% dr total peserta
	Perempuan	Laki-laki		
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. MKJP				
a. IUD	14.163		14.163	9.29
b. MOP		2.131	2.131	1.32
c. MOW	9.967		9.967	7.32
d. Implan	19.709		19.709	13.11
2. Non-MKJP				
a. suntikan	78.796		78.796	52.88
b. pil	16.766		16.766	13.04
c. kondom		5.262	5.262	3.05
Jumlah=	139.401	7.393	146.794	100
%	94,96	5,04	100	

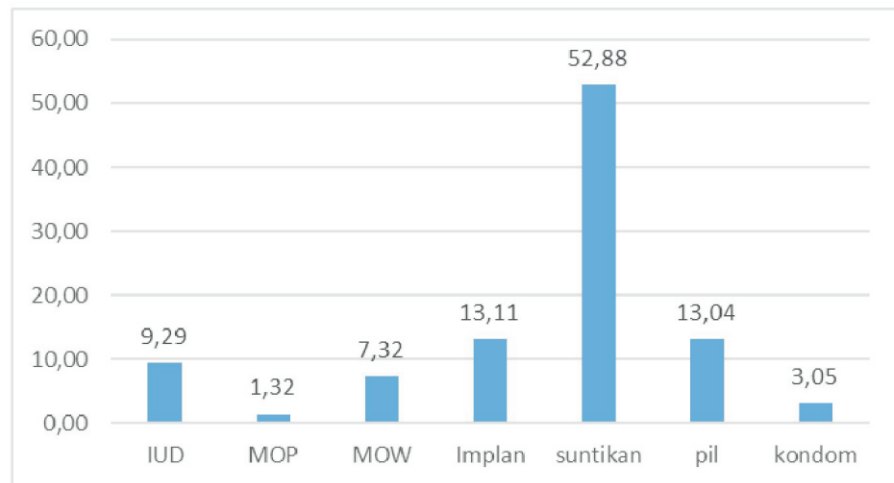
Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga, 2019

Keterangan:

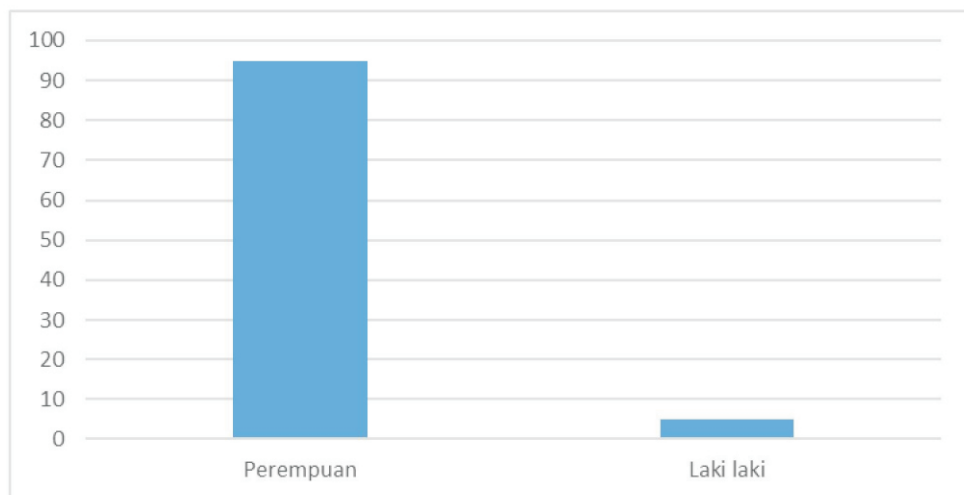
MKJP: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Non-MKJP: bukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Gambar 5.4 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



Gambar 5.5 Kepesertaan KB Menurut Jensi Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019



Berdasarkan uraian pada Bab ini dapat dirangkumkan bahwa tingkat pendidikan keluarga di Kabupaten Purbalingga pada umumnya masih rendah. Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab masih adanya KK yang tidak mempunyai pekerjaan. Akibatnya, banyak keluarga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera. Sementara itu, partisipasi KB mereka masih didominasi kontrasepsi

non NKJP. Di antara mereka yang ber-KB, sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang pendek yakni suntikan.

BAB VI

PENDIDIKAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol,

dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 2 disebutkan bahwa PIP bertujuan untuk: (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun, (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan/atau, (c) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja (https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2016_Nomor019.pdf).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan akses yang sama bagi penduduk laki-laki maupun perempuan. Bab berikut ini menampilkan profil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dari aspek: partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, partisipasi berdasarkan kelompok umur serta partisipasi dalam Program Kejar Paket.

6.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui dari tiga indikator yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ketiganya dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dalam hal ini ketiganya digunakan untuk melihat jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B serta jenjang SMA/SMK/Paket C.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS usia 7-12 tahun misalnya, berarti adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan

jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=10>).

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD misalnya, adalah jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%. Ukuran ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>).

APK adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah

pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=8>).

Untuk tahun 2019, APS anak usia 7-12 tahun secara keseluruhan adalah sebesar 99,84 persen. Dengan persentase ini menunjukkan telah diperolehnya akses bagi penduduk umur 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, apabila datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin, tampak ada perbedaan yang besar antar peluang mengakses di kalangan penduduk 7-12 tahun laki-laki dan perempuan karena peluang untuk penduduk laki-laki jauh lebih besar.

Dilihat dari data APK tampak bahwa APK untuk jenjang PAUD belum mencapai 100 persen di mana komposisi antara APK PAUD anak laki-laki dan perempuan berimbang. Adapun untuk APK jenjang SD dan SMP secara keseluruhan telah melebihi 100 persen Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Namun demikian, dilihat dari APK SMP jenis kelamin tampak masih ada kesenjangan gender di mana APK perempuan lebih tinggi dibanding laki – laki dengan range yang cukup signifikan.

Sementara itu, untuk data APM tampak bahwa secara keseluruhan, APM jenjang SD maupun SMP sudah mencapai 100 persen, dimana APM jenjang SD maupun SMP antara laki – laki dan perempuan secara umum berimbang. Untuk APM SD laki – laki lebih tinggi sedangkan untuk APM SMP perempuan lebih tinggi.

Tabel 6.1 APM, APK dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Indikator/ Bidang	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			
usia 7 - 12 tahun	*	*	*
usia 13 - 15	*	*	*
usia 16 – 18	*	*	*
Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
PAUD	82,56	84,86	83,68
SD / MI	121,56	119,09	120,37
SMP / MTs	135,94	143,22	139,47
SMK/ SMA / MA*	*	*	*
Angka Partisipasi Murni (APM) :			
SD/ MI	106,91	104,41	105,70
SMP / MTs	101,08	104,03	102,51
SMK/ SMA / MA	*	*	*

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2020

6.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas pendidikan seseorang dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Data ini juga bermanfaat sebagai analisis pasar kerja. Secara keseluruhan, di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas, persentase terbesar dari mereka adalah pada mereka yang berpendidikan rendah yakni mereka yang berpendidikan jenjang SD dan SMP. Bahkan masih ada yang tidak tamat SD dan tidak/belum. Secara keseluruhan terlihat pula bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentasenya. Fenomena ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan dengan angka yang berimbang.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/ belum pernah sekolah	1,41	2,17	1,81
Tidak/ belum tamat SD/ MI	19,78	21,04	20,43
SD/ SDLB / MI	35,99	35,95	35,97
SMP / SMPLB/ MTs	21,70	23,06	22,40
SMP/ SMK/ SMLB/ MA	17,12	12,81	14,89
DI,DII, DIII/ Sarjana Muda	0,75	1,32	1,04
DIV/ S1 dan S2/S3	3,24	3,65	3,45
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

6.3 Partisipasi Berdasarkan Kelompok Umur

Fenomena pendidikan juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Persentase terbesar adalah pada kelompok umur 7-12 tahun secara keseluruhan yang mencapai sekitar separoh dari seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas. Persentase terbesar berikutnya adalah pada kelompok umur 13-15 tahun yang disusul umur 16-18 tahun. Kondisi ini tidak terlalu berbeda pada kelompok penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
5 - 6	3,26	6,29	4,76
7 - 12	53,75	50,66	52,22
13 - 15	25,73	23,18	24,47
16 - 18	11,07	16,56	13,79
19 - 21	2,93	1,32	2,13
22 - 24	1,30	0,66	0,99
25+	1,95	1,32	1,64
Total =	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

Fenomena pendidikan juga dapat dilihat dari data partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur di kalangan penduduk berumur 7-24 tahun. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mempunyai tingkat partisipasi tinggi. Tingkat partisipasi sekolah semakin menurun seiring dengan semakin tinggi umur mereka. Pada kelompok umur 19-24 tahun, tingkat partisipasi sekolahnya hanya sekitar 80 persen. Kondisi ini tidak terlalu jauh berbeda di kalangan penduduk laki-laki dan perempuan. Hanya pada kelompok umur 19-24 tahun, persentasenya sedikit lebih tinggi di kalangan penduduk laki-laki. Dari kelompok umur ini dapat diperkirakan bahwa tingkat pendidikan laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tdk/ blm pernah sekolah	Masih sekolah	Tidak sekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
7 - 12		99,68	0,32
13 - 15		94,29	5,71
16 - 18		55,09	44,91
19 - 21		15,53	84,47
Perempuan			
7 - 12		100,00	
13 - 15		93,18	6,82
16 - 18		64,03	35,97
19 - 21	0,91	6,65	92,44
Laki-laki dan Perempuan			
7 - 12		99,84	0,16
13 - 15		93,77	6,23
16 - 18		59,96	40,04
19 - 21		11,09	88,46

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

6.4 Partisipasi dalam Kejar Paket

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah, diselenggarakan pula pendidikan melalui jalur non-formal. Jalur ini meliputi Kelompok Belajar (Kejar) Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA. Kegiatannya dapat dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan sejenis lainnya.

Dilihat dari jenjangnya, jumlah peserta terbanyak adalah pada Program Paket C yang disusul dengan Program Paket B dan A. Untuk setiap Program paket pada Paket C dan program paket B, jumlah

peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk paket A prosentase antara laki – laki dan perempuan berimbang. Kesenjangan antara laki – laki dan perempuan pada program kejar paket B dan paket C cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan kurangnya perhatian perempuan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Demikian halnya dengan jumlah Tutor (guru), yang terbanyak adalah pada Paket C. Jumlah tutor laki - laki lebih banyak pada semua Program Kejar Paket A , B maupun Paket C.

Tabel 6.5 Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/ Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peserta didik:					
Kejar Paket A	24	48,97	25	51,02	49
Kejar Paket B	573	65,11	307	34,86	880
Kejar Paket C	1.273	53,96	1.086	46,03	2.359
Tutor :					
Kejar Paket A	10	52,63	9	47,36	19
Kejak Paket B	58	50,43	57	49,56	115
Kejar Paket C	92	42,79	123	57,20	215

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya. Fenomena ini terutama terjadi di kalangan perempuan. Pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menempuh berbagai kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan sumber daya yang ada. Hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah ketenagakerjaan, karena merupakan aspek yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan akan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Bab ini mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dari perspektif gender dilihat dari: (1) penduduk usia kerja dan jenis kegiatannya, (2) status pekerjaan, (3) lapangan kerja serta (4) jumlah jam kerja). Di samping itu, ditampilkan pula kondisi kegiatan ekonomi di bidang perkoperasian dan pariwisata.

7.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Golongan penduduk ini dapat dilihat berdasarkan jenis kegiatan utamanya, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada pasar kerja yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan/usaha baru. Adapun bukan angkatan kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya.

Dari hasil Sakernas 2019 diketahui bahwa secara keseluruhan, sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Purbalingga adalah merupakan angkatan kerja, yakni sebesar 67,88 persen. Adapun sisanya adalah mereka yang bukan angkatan kerja. Mayoritas angkatan kerja adalah mereka yang bekerja. Hal ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan.

Apabila dilihat dari jenis kelaminnya, maka persentase angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yakni 68,72 persen, sedangkan perempuan 41,28 persen. Mayoritas angkatan kerja baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah bekerja. Untuk mereka yang bekerja, sebagian dari mereka adalah laki-laki (58,54 persen).

Dari tingkat partisipasi angkatan kerja 67,88 persen tingkat pengangguran terbuka 4,78 persen. Tingkat pengangguran terbuka laki laki 5,07 persen lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan yakni 4,37 persen.

Adapun pada kelompok bukan angkatan kerja, mayoritas dari mereka adalah kalangan perempuan (72,15 persen). Di kalangan laki-laki kebanyakan melakukan kegiatan selain sekolah dan mengurus rumah tangga. Sementara itu, di kalangan perempuan, mayoritas kegiatan bukan angkatan kerjanya adalah sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perempuan	%		
1. Angkatan Kerja	280.027	58,72	196.869	41,28	476.896	67,88
1.1 Bekerja	265.829	58,54	188.269	41,46	454.098	64,64
1.2 Pengangguran Terbuka	14.198	62,28	8.600	37,72	22.798	3,25
2. Bukan Angkatan Kerja	62.832	27,85	162.805	72,15	225.637	32,12
2.1 Sekolah	20.418	53,32	17.873	46,68	38.291	5,45
2.2 Mengurus Rumah Tangga	16.063	10,90	131.293	89,10	147.356	20,97
2.3 Lainnya	26.351	65,89	13.639	34,11	39.990	5,69
JUMLAH	342.859	48,80	359.674	51,20	702.533	100,00

Sumber: BPS, 2020

7.2 Status Pekerjaan

Di antara mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, dapat dibedakan berdasarkan status pekerjaannya. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Purbalingga didominasi jenis kelamin laki laki yaitu 58,54 persen dan sisanya sebesar 41,46 persen adalah perempuan. Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk bekerja di Kabupaten Purbalingga berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (39,44 persen), disusul dengan berusaha sendiri (21,29 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (16,77 persen).

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa mayoritas dari kelompok angkatan kerja laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh (39,44 persen) di mana persentase di kalangan laki - laki lebih tinggi (52,43 persen) dibandingkan perempuan (47,57 persen). Kemudian terbanyak kedua adalah berusaha sendiri yakni

21,29 persen dimana prosentase laki laki 65,03 persen dan perempuan 34,97 persen. Disusul berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebanyak 16,77 persen dengan prosentase laki – laki 63,84 persen dan perempuan 36,16 persen.

Tabel 7.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Status pekerjaan utama	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki – Laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	48.626	63,84	27.545	36,16	76.171	16,77
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh di bayar	11.954	73,91	4.219	26,09	6.173	3,56
- Buruh/karyawan/pegawai	93.899	52,43	85.196	47,57	179.095	39,44
- Pekerja Bebas	38.549	75,16	12.738	24,84	51.287	11,29
- Pekerja keluarga /takdibayar	9.925	28,62	24.759	71,38	34.684	7,64
JUMLAH	265.829	58,54	188.272	41,46	454.101	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

7.3 Lapangan Usaha Utama

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Secara keseluruhan, sebagian besar pekerja bekerja di industri pengolahan (28,46 persen), disusul dengan bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan (21,24 persen) serta Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,84 persen).

Namun demikian, apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok perempuanlah yang lebih banyak bekerja di bidang industri pengolahan. Lebih dari separoh (61,64 persen) dari mereka

menekuni lapangan usaha ini. Adapun di kalangan laki-laki hanya sekitar 38,36 persen. Selain bekerja di industry pengolahan, jasa pendidikan juga menjadi bidang pekerjaan yang di dominasi perempuan yaitu sebesar 63, 69 persen dan sisanya 36,31 persen oleh laki – laki. Untuk bidang bangunan, angkutan dan pergudangan 100,00 persen ditekuni laki – laki. Selaian itu bidang pertambangan dan penggalian juga di dominasi laki – laki sebesar 83,30 persen dan perempuan 16,70 persen.

Lapangan usaha lainnya yang cukup banyak ditekuni baik oleh laki-laki maupun perempuan adalah bidang penyediaan akomodasi dan makan minum 48,04 persen sedangkan prosentase perempuan 51,96 persen. Kemudian bidang jasa kesehatan dan kegiatan social juga mempunyai prosentase yang berimbang antara laki – laki dan perempuan yaitu 51,21 persen sedangkan perempuan 48,79 persen. Disusul bidang jasa lainnya dimana prosentase laki – laki dan perempuan berimbang yaitu untuk 48,70 persen untuk laki – laki dan 51,30 persen untuk perempuan.

Tabel 7.3 Jumlah Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki – Laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	71.726	74,37	24.715	25,63	96.441	21,24
- Pertambangan dan Penggalian	5.009	83,30	1.004	16,70	6.013	1,32
- Industri pengolahan	49.575	38,36	79.675	61,64	129.250	28,46
- Kontruksi	34.215	100,00	-	-	34.215	7,53
- Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	47.456	55,47	38.093	44,53	85.549	18,84
- Angkutan dan pergudangan	14.086	100,00	-	-	14.086	3,10
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.926	48,04	10.737	51,96	20.663	4,55
- Jasa Keuangan dan Asuransi	2.694	53,84	2.310	46,16	5.004	1,10
- Jasa Perusahaan	3.345	55,88	2.641	44,12	5.986	1,32
- Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.977	67,64	1.903	32,36	5.880	1,29
- Jasa Pendidikan	6.718	36,31	11.784	63,69	18.502	4,07
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.128	51,21	3.933	48,79	8.061	1,78
- Jasa Lainnya	10.135	48,70	10.675	51,30	20.810	4,58
- Pertambangan, energi dan informasi	2.836	78,02	799	21,98	3.635	0,80
JUMLAH	265.826	58,54	188.269	41,46	454.095	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

7.4 Jumlah jam kerja

Jumlah jam kerja ikut memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari separoh (51,65 persen) dari mereka yang

berumur 15 tahun ke atas bekerja menghabiskan waktu lebih dari 41 jam per minggu untuk mengerjakan pekerjaan utama mereka. Hal ini lebih banyak terjadi di kalangan pekerja laki-laki (65,84 persen). Secara keseluruhan, jumlah jam kerja laki-laki untuk semua kelompok, kecuali pada kelompok jam kerja 0 dan 1-14 jam.

Tabel 7.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (jam)	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perem- puan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	6.719	49,09	6.967	50,91	13.686	3,01
1-14	17.910	42,55	4.185	57,45	42.095	9,27
15-24	27.954	53,88	23.924	46,12	51.878	11,42
25-34	25.159	55,60	20.093	44,40	45.252	9,97
35-40	33.668	50,52	32.977	49,48	66.645	14,68
41+	154.419	65,84	80.123	34,16	234.542	51,65
JUMLAH	265.829	58,54	188.269	41,46	454.098	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

7.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka

Fenomena ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari sektor pekerjaannya. Dalam hal ini para pekerja perempuan di Kabupaten Purbalingga lebih banyak yang bekerja di sektor formal swasta dibandingkan dengan pekerja laki-laki (67,16 persen). Sementara itu, para pekerja yang bekerja sebagai tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) laki – laki sebesar 12,23 persen sedangkan perempuan 87,77 persen. Untuk tenaga kerja Antar Kerja Antar

Daerah (AKAD) sebanyak 26,32 persen laki – laki 73,68 persen.

Gambaran selengkapnya ditampilkan pada table berikut ini.

Tabel 7.5 Kondisi Ketenagakerjaan dilihat dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja Migran*					
Tenaga Kerja di Sektor Formal	16.883	32,84	34.525	67,16	51.408
Tenaga Kerja di sektor Informal*					
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	23	12,23	165	87,77	188
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	5	26,32	14	73,68	19
Pengangguran Terbuka*					
Pengangguran Tertutup*					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2020

Di samping kondisi ketenagakerjaan secara umum, aktivitas perekonomian masyarakat juga dapat terlihat di berbagai bidang, antara lain bidang pertanian dan peternakan dan perkoperasian. Di bidang pertanian, keberadaan mereka tampak dari aktivitas dalam kelompok tani. Dalam hal ini, para petani perempuan terwadahi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berjumlah 150 kelompok. Adapun jumlah pengurusnya adalah sebanyak 450 orang dengan jumlah anggota sebanyak 4.500 orang.

Tabel 7.6 Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kelompok Tani Sektor Pertanian					1.479
Pengurus Kelompok Tani Sektor Pertanian	3.550	80,01	887	19,99	4.437
Anggota Kelompok Tani Sektor Pertanian	52.370	83,13	10.629	16,87	62.999
Kelompok Wanita Tani (KWT)			150	100,00	150
Pengurus KWT			450	100,00	450
Anggota KWT			4.500	100,00	4.500
2 Kelompok Tani Sektor Pekebunan					114
Pengurus Kelompok Tani Sektor Pekebunan	308	90,06	34	9,94	342
Anggota Kelompok Tani Sektor Pekebunan	5.130	90,00	570	10,00	5.700
3 Kelompok Tani Sektor Peternakan					413
Pengurus Kelompok Tani Sektor Peternakan	1.115	89,99	124	10,01	1.239
Anggota Kelompok Tani Sektor Peternakan	3.717	90,00	413	10,00	4.130

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2020

Adapun untuk kegiatan ekonomi di bidang perikanan, tampak bahwa bidang ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tampak dari sedikitnya jumlah perempuan pembudidaya ikan dan tidak adanya perempuan pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi maupun yang aktif dalam kegiatan minapolitan sebagaimana tampak dari table berikut ini.

Tabel 7.7 Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembudidaya Ikan	10.243	98,00	209	2,00	10.452
2	Pembudidaya Ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi	75	100,00	0	0.00	75
3	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya UGADI*					
4	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya nila salin*					
5	Pembudidaya ikan yang aktif dalam temu lapang pakan ikan berbahan baku lokal dan pengembangan kawasan minapolitan					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: DKPP Kabupaten Purbalingga, 2020

Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat sangat mempengaruhi ekonomi kelas bawah. Untuk Koperasi Perempuan di Kabupaten Purbalingga sejumlah 5 koperasi hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu eksist di bidang perkoperasian. Untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan DINKOPUMKM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 jumlah cukup signifikan dan juga penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa menjadi solusi pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Pelaku UMKM masih didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 60,00 persen dan laki – laki 40 persen. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja perempuan sebesar 70 persen dan laki – laki 30,00 persen. Eksistensi perempuan di bidang ini cukup menonjol sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.8 Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019**

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Peremp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Koperasi Wanita/Perempuan		0,00	5	100,00	5
Jumlah Penyerapan Koperasi	4	16,67	20	83,33	24
Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	38.637	40,00	57.955	60,00	96.592
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	86.993	30,00	202.983	70,00	289.976

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Purbalingga, 2020

Sektor lain yang menggiatkan usaha di Purbalingga adalah dari bidang pariwisata. Di Purbalingga, saat ini terdapat 29 desa wisata. Dari sektor pariwisata masih didominasi oleh laki – laki baik itu dari kepemilikan hotel, tenaga kerja pengelola desa wisata, penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata maupun pramuwisata. Perempuan hanya dominasi di kepemilikan warung makan dan penyerapan tenaga kerja di warung makan. Adapun jumlah warung makan merupakan usaha warung makan yang telah memiliki/mengurus perizinan usaha warung makan. Gambaran kepemilikan dan ketenagakerjaan sector hiburan dan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 7.9 Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Desa Wisata					29
2	Pemilik Hotel	11	84,62	2	15,38	13
3	Pemilik Warung Makan	12	28,57	30	71,43	42
4	Pengelola Desa Wisata	136	72,73	51	27,27	187
5	Tenaga Kerja di Warung Makan	50	31,25	110	68,75	160
6	Tenaga Kerja di Obyek Wisata	318	75,71	102	24,29	420
7	Pramuwisata	46	75,41	15	24,59	61

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari gambaran di atas tampak bahwa di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan. Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga. Keberadaan perempuan juga cukup terlihat pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata.

BAB VIII

POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK

Kondisi penduduk di bidang politik dan sektor publik menjadi salah satu bidang yang dijadikan indikator tingkat keberdayaan perempuan yang dikenal dengan indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk IDG Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 70,60 lebih rendah dari IDG tahun 2018 yaitu 75,51. Hal ini dimungkinkan menurunnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat dalam proses pemilihan umum. Selain itu eksistensi mereka dalam berbagai lembaga publik. Untuk bab ini ditampilkan data yang terkait dengan fenomena kondisi gender di DPRD yang dilihat dari asal partai dan komisi serta umurnya serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019.

Ditampilkan pula fenomena gender di berbagai organisasi publik baik di lingkungan Pemkab Purbalingga maupun organisasi-organisasi vertikal yang ada di Purbalingga. Disajikan pula fenomenanya pada lembaga pemerintahan di tingkat pedesaan.

8.1 Politik dan Legislatif

Untuk keanggotaan di lembaga DPRD Kabupaten Purbalingga, dari sejumlah 45 orang anggota, sebanyak 22,22 persen (10 orang) diantaranya perempuan. Pada periode 2019 – 2024 jumlah perempuan yang duduk di Legislatif menurun dibandingkan periode sebelumnya 2014 – 2019 yaitu 31,11 persen atau (14 orang) dari total jumlah Legislatif. Kebanyakan dari mereka berasal dari partai PDIP sebanyak 3 orang disusul PKS 2 orang dengan masing-masing 1

orang yaitu PPP, PAN, partai Gerinda, Partai Golkar dan Partai nasdem. Berikut ini ditampilkan tabelnya.

Tabel 8.1 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Persatuan Pembangunan	1	50,00	1	50,00	2	4,44
2	Partai Demokrat	2	100,00	0	0,00	2	4,44
3	Partai Amanat Nasional	3	75,00	1	25,00	4	8,89
4	Partai Kebangkitan Bangsa	9	100,00	0	0,00	9	20,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	50,00	2	50,00	4	8,89
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	70,00	3	30,00	10	22,22
7	Partai Gerindra	5	83,33	1	16,67	6	13,33
8	Partai Hanura						
9	Partai Golongan Karya	6	85,71	1	14,29	7	15,56
10	Partai Nasdem	0	0,00	1	100,00	1	2,22
11	Partai Perindo						
Jumlah		35	77,78	10	22,22	45	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 2020

Sementara itu, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Apabila dilihat dari sebaran anggota dalam Komisi, maka Komisi III memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak, sedangkan Komisi IV memiliki jumlah anggota perempuan tersedikit.

Tabel 8.2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Komisi I	8	2	10
2. Komisi II	9	2	11
3. Komisi III	6	4	10
4. Komisi IV	9	1	10
Jumlah	32	9	41

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2020

Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD Purbalingga adalah mereka yang berumur sedang yakni 41-50 tahun. Hal ini terutama terjadi di kalangan anggota laki-laki, meskipun ada juga yang berumur tua (61-70 tahun). Adapun di kalangan anggota perempuan, kebanyakan berusia lebih muda (31-40 tahun). Terdapat juga anggota perempuan 41-60 tahun, namun tidak ada yang berusia tua (21-30 tahun) dan usia (61-70 tahun).

Tabel 8.3 Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019

No.	Umur Anggota DPRD	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	21 - 30 Tahun	2	100,00	0	0	2
2	31 - 40 Tahun	2	28,57	5	71,43	7
3	41 - 50 Tahun	19	82,61	4	17,39	23
4	51 - 60 Tahun	8	88,89	1	11,11	9
5	61 - 70 Tahun	4	100,00	0	0	4
Jumlah		35	77,78	10	22,22	45

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2020

Keberadaan keanggotaan DPRD tersebut tidak terlepas dari proses Pemilihan Umum yang berlangsung sebelumnya. Dalam proses tersebut, terdapat 491 calon anggota legislatif yang sebagian besarnya (59,06 persen) adalah laki-laki dan 40,94 persen calon legislatif perempuan. Mereka berasal dari berbagai partai politik yang kebanyakan dipimpin oleh laki-laki dari 15 partai politik 13 diantaranya (86,67 persen) dipimpin oleh laki – laki dan 2 partai politik (13,33 persen) dipimpin oleh perempuan. Adapun jumlah penduduk yang

mempunyai hak pilih adalah sebanyak 737.595 orang di mana persentase antara laki – laki dan perempuan berimbang yaitu 50,26 persen laki – laki dan 49,74 persen perempuan. Namun demikian, persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki (53,06 persen).

Tabel 8.4 Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	290	59,06	201	40,94	491
2	Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih	378.042	50,26	374.169	49,74	752.211
3	Jumlah Penduduk yang Gunakan Hak Pilih	277.214	46,94	313.340	53,06	590.554
4	Jumlah Pimpinan Partai Politik	13	86,67	2	13,33	15
5	Jumlah Kepengurusan Partai Politik	319	70,73	132	29,27	451

Sumber: KPUD Kabupaten Purbalingga, 2020

8.2 Pemerintahan Kabupaten

Saat ini Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh seorang Plt. Bupati perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, Plt. Bupati dibantu oleh sejumlah pejabat eselon II, III dan IV serta sejumlah Pegawai Negeri Sipil/PNS (sekarang: Aparat Sipil Negara/ASN). Di tingkat kecamatan, Plt Bupati dibantu oleh 18 Camat yang terdiri dari 17 camat laki – laki dan 1 orang camat perempuan..

Jumlah ASN di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 7.447 orang di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 52,97 persen dan laki – laki 47,03 persen. Dilihat dari jenjang eselon, tampak bahwa laki-laki mendominasi semua eselon,

terutama eselon tertinggi yakni eselon II. Pada eselon II, dari 29 pejabat, hanya terdapat 1 pejabat perempuan.

Di kalangan pejabat perempuan, kebanyakan dari mereka menjadi pejabat eselon IV (179 orang), sedangkan pada eselon III terdapat 34 orang. Adapun pada eselon II hanya ada satu orang perempuan. Sementara itu, untuk pejabat laki-laki, jumlah terbanyak juga pada eselon IV yang disusul dengan eselon III.

Tabel 8.5 Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Jabatan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Bupati	-		1	100,00	1
2	Jumlah Wakil Bupati	-		-		-
3	Jumlah Camat	17	94,45	1	5,55	18
4	Jumlah Pejabat Eselon II	28	96,55	1	3,45	29
5	Jumlah Pejabat Eselon III	112	76,71	34	23,29	146
6	Jumlah Pejabat Eselon IV	310	63,39	179	36,61	489
7	Jumlah PNS	3.502	47,03	3.945	52,97	7.447
8	Jumlah PNS yang melakukan perceraian	10	40,00	15	60,00	25
9	Jumlah PNS yang melakukan indisipliner	9	81,82	2	18,18	11
10	Jumlah PNS Gol IV	1.057	49,86	1.063	50,14	2.120
11	Jumlah PNS Gol III	1.676	40,48	2.464	59,52	4.140
12	Jumlah PNS Gol II	676	62,59	404	37,41	1.080
13	Jumlah PNS Gol I	93	86,92	14	13,08	107
Jumlah		7.490		8.123		15.613

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2020

Ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten adalah para ASN yang tersebar di berbagai unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga. Persebaran ASN yang di berbagai unit kerja didominasi oleh laki – laki. Prosentase ASN perempuan hanya dominasi di unit kerja bidang kesehatan dan pendidikan.

Jumlah terbanyak adalah pada RSUD Panti Nugroho di mana 83,64 persen ASN perempuan sementara ASN laki – laki hanya 16,36 persen. Kemudian disusul UPT Puskesmas se Kabupaten Purbalingga 77,28 persen ASN perempuan dan 22,72 ASN laki – laki. Dominasi ASN perempuan di Unit Kerja peringkat tiga yaitu RSUD Goeteng Tarunadibrata sebanyak 61,67 ASN Perempuan dan 38,33 ASN laki – laki. Kemudian di unit kerja bidang pendidikan yaitu UPT Dindikbud Kecamatan dan UPT SMP Negeri yang masing masing 57,84 persen dan 54,25 persen yang mayoritas ASN sebagai profesi guru .

Tabel 8.6 Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	110	69,18	49	30,82	159
2	Sekretariat DPRD	19	73,08	7	26,92	26
3	Inspektorat Daerah	27	57,45	20	42,55	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	20	62,50	12	37,50	32
5	Badan Keuangan Daerah	43	55,84	34	44,16	77
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah	23	53,49	20	46,51	43
7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	58	65,17	31	34,83	89
8	Dinas Kesehatan	52	52,53	47	47,47	99
9	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	83	94,32	5	5,68	88
10	Dinas Perumahan & Pemukiman	20	80,00	5	20,00	25
11	Dinsos Dalduk KB P3A	23	58,97	16	41,03	39
12	Dinas Tenaga Kerja	24	75,00	8	25,00	32
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	31	75,61	10	24,39	41
14	Dinas Pertanian	99	61,49	62	38,51	161
15	Dinas Lingkungan Hidup	97	86,61	15	13,39	112
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	47,83	12	52,17	23
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	66,67	8	33,33	24
18	Dinas Perhubungan	35	87,50	5	12,50	40
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	53,57	13	46,43	28

20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	13	59,09	9	40,91	22
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	69,57	7	30,43	23
22	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	20	64,52	11	35,48	31
23	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	14	60,87	9	39,13	23
24	Dinas Perindustrian & Perdagangan	57	82,61	12	17,39	69
25	Satuan Polisi Pamong Praja	46	86,79	7	13,21	53
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	66,67	4	33,33	12
27	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	100,00	0	0,00	13
28	RSKBD Panti Nugroho	9	16,36	46	83,64	55
29	RSUD Goeteng Taroenadibrata	161	38,33	259	61,67	420
30	Kantor Kecamatan	176	74,89	59	25,11	235
31	Kantor Kelurahan	76	62,81	45	37,19	121
32	UPTD Puskesmas	167	22,72	568	77,28	735
33	UPT SMP Negeri	560	45,75	664	54,25	1224
34	UPT Dindikbud Kecamatan	1.360	42,16	1.866	57,84	3.226
Jumlah		3.502	47,03	3945	52,97	7.447

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga 2020

Di samping para ASN yang merupakan pegawai di lingkungan Pemkab Purbalingga, terdapat pula sejumlah ASN yang berasal dari lembaga-lembaga publik di luar lingkungan Pemkab Purbalingga. Jumlah mereka adalah sebanyak 1.534 orang di mana lebih dari separohnya (51,04 persen) adalah perempuan. Mereka tersebar di lembaga - lembaga Pemerintah yang merupakan instansi vertikal. Instansi terbanyak adalah Kementerian Agama yakni sebesar 57,18 persen perempuan dan 42,82 persen adalah laki - laki.

Tabel 8.7 Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Negeri Purbalingga	17	56,67	13	43,33	30
2	Pengadilan Agama Purbalingga	18	85,71	3	14,29	21
3	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	45	80,36	11	19,64	56
4	Kantor Pertanahan Purbalingga	27	65,85	14	34,15	41
5	Polres Purbalingga	20	46,51	23	53,49	43
6	Kodim 0702 Purbalingga	12	54,55	10	45,45	22
7	Kejaksaan Negeri Purbalingga	25	65,79	13	34,21	38
8	Kantor Kementerian Agama Purbalingga	459	42,82	613	57,18	1072
9	Badan Pusat Statistik Purbalingga	22	64,71	12	35,29	34
10	RUPBASAN Purbalingga	12	70,59	5	29,41	17
11	Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman	10	43,48	13	56,52	23
12	KPP Pratama Purbalingga	72	66,67	36	33,33	108
13	Badan Narkotika Nasional Purbalingga	5	33,33	10	66,67	15
14	Komisi Pemilihan Umum Purbalingga	7	50,00	7	50,00	14
JUMLAH		751	48,96	783	51,04	1.534

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2020

8.3 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan ditampilkan kondisi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2019. Sesuai dengan data yang ada, dalam hal ini dilakukan penggabungan antara data Desa dengan Kelurahan. Di tingkat desa/kelurahan, terdapat 239 orang Kepala Desa/Kelurahan yang mayoritasnya (90,79 persen) adalah laki-laki dan perempuan sebesar 9,21 persen. Dalam menjalankan tugasnya, para kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Jumlah mereka adalah sebanyak 1.836 orang yang mayoritasnya (87,80 persen) adalah laki-laki dan 12,20 persen perempuan. Untuk unsur pemerintahan desa lainnya yaitu BPD, RT dan RW tahun 2019 tidak terdapat data yang mendukung. Demikian pula untuk data Kepala Desa yang telah melaksanakan pelatihan juga belum ada data di tahun 2019.

Tabel 8.8 Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kepala Desa / Lurah Se Kabupaten Purbalingga	206	90,79	33	9,21	239
2. Perangkat Desa	1.612	87,80	224	12,20	1.836
3. Kepala Desa yang Telah* Mengikuti Pelatihan / BinteK					
4. Ketua RT / RW se Kabupaten Purbalingga*					
5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebutan Lainnya*					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga, 2020

8.4 Kepolisian

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Polres membawahi sejumlah wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. Jabatan di bidang kepolisian ini merupakan salah satu wujud organisasi publik yang untuk itu perlu diketahui gambarannya dari perspektif gender.

Wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 16 Polsek di tingkat kecamatan. Saat ini Polres Purbalingga dipimpin oleh seorang laki-laki. Dan untuk tahun 2019 dari 16 Polsek se Kabupaten Purbalingga di pimpin oleh Kapolsek yang semuanya laki – laki. Sementara jumlah polisi wanita di wilayah Resort Purbalingga sebanyak 54 orang atau 6,99 persen dari total jumlah polisi di wilayah Resort Purbalingga. Dari sejumlah polisi wanita sebanyak 38 orang atau 70,37 persen penempatan di unit kerja Polres Purbalingga dan selebihnya 16 orang atau 29,63 persen tersebar di unit kerja Polsek se kabupaten Purbalingga.

Tabel 8.9 Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Polres/Polrestabes (Kepolisian)	1	100,00	0	0,00	1
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	16	100,00	0	0,00	16
Pejabat Polisi di Wilayah Polres*					
Polisi di Polres	349	90,18	38	9,82	387
Polisi di Polsek	370	95,85	16	4,15	386

Sumber: Polres Kabupaten Purbalingga 2020

8.5 Yudikatif

Di lembaga yudikatif khususnya Kejaksaan, terdapat 36 orang PNS yang sepertiganya adalah perempuan. Dari sejumlah pejabat yang ada 20,00 persen dijabat oleh perempuan. Sementara itu dari 12 jaksa yang ada, hanya terdapat satu jaksa perempuan.

Tabel 8.10 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNS di Kejaksaan Menurut Golongan	24	66,67	12	33,33	36
2	Pejabat di Kejaksaan	16	80,00	4	20,00	20
3	Jaksa di Kejaksaan	12	92,31	1	7,69	13
Jumlah		52	75,36	17	24,64	69

Sumber: Kejaksaan Negeri Purbalingga 2020

Pada lembaga Pengadilan Negeri (PN), saat ini terdapat terdapat 30 PNS dimana 43,33 persen adalah perempuan dan selebihnya 56,67 persen adalah laki – laki. Sementara dari 6 pejabat yang sepertiga merupakan pejabat perempuan. Demikian pula dengan hakim di PN Purbalingga dari 6 hakim yang ada 2 diantaranya merupakan hakim perempuan.

Tabel 8.11 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNS di PN Menurut Golongan	17	56,67	13	43,33	30
2	Pejabat di PN	4	66,67	2	33,33	6
3	Hakim di PN	4	66,67	2	33,33	6
Jumlah		25	58,14	18	41,86	43

Sumber: Pengadilan Negeri Purbalingga, 2020

Sementara itu, di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 20 orang pegawai yang ada, terdapat 15,00 persen pegawai perempuan dan 85,00 persen pegawai laki - laki. Dan untuk 2 orang pejabat semuanya laki – laki. Demikian pula dengan hakim sejumlah 3 orang yang semuanya juga laki - laki. Adapun perempuan yang menjadi pejabat dan Hakim masing-masing terdapat satu orang.

Tabel 8.12 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah PNS di PA Purbalingga Menurut Golongan	17	85,00	3	15,00	20
2	Jumlah Pejabat di PA	2	100,00	0	0,00	2
3	Jumlah Hakim di PA	3	100,00	0	0,00	3
	Jumlah	22	88,00	3	12,00	25

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari uraian tentang dunia politik dan publik di berbagai bidang tersebut dapat dirangkum beberapa hal. Pertama, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik (baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kedua, di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki – laki namun yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit. Di lingkungan pemerintahan desa masih banyak di dominasi laki – laki. Demikian pula dengan di

lembaga-lembaga publik jenjang vertical lainnya seperti kepolisian dan pengadilan.

BAB IX

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Isu gender lain yang perlu dikemukakan adalah fenomena kekerasan berbasis gender. Jenis kekerasan ini lebih spesifik dibandingkan dengan kekerasan pada umumnya. Menurut *Inter-Agency Standing Committee* (IASG), kekerasan berbasis gender (KBG) adalah: 'Terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender, antara lain : (1) seksual (2) fisik; (3) Praktek tradisional yang membahayakan; (4) sosial ekonomi and (5) emosional dan psikologis (<https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>).

Dari definisi tersebut, tampak bahwa KBG adalah istilah umum untuk banyak jenis kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas. Termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah praktis tradisional yang membahayakan seperti sunat perempuan (*female genital mutilation*), perkawinan paksa (*forced or arranged marriage*) dan perkawinan di usia dini (*early marriage*).

Definisi KBG lainnya diberikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* yakni: kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan (<https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>). Dalam

definisi ini, jika terdapat ancaman, maka sudah termasuk adanya tindak kekerasan.

Dengan demikian, berbeda dengan kekerasan yang sifatnya umum, KBG adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual, maka itulah KBG. Jika motif atau niatannya sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka itu kategori kekerasan umum.

KBG dapat terjadi baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga biasa dikenal dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sudah termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam pasal 1 disebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penekanan terhadap perempuan dalam definisi tersebut disebabkan hingga saat ini kebanyakan korban KDRT adalah perempuan. Adapun lingkup rumah tangga dalam UU tersebut meliputi: a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A juga berkomitmen menangani kasus KBG. Melalui Tim Harapan (Hapus Kekerasan pada Perempuan dan Anak) yang beranggotakan gabungan dari berbagai instansi yang terkait dengan proses penanganan kekerasan, telah dilakukan sejumlah upaya bagi para korban. Dengan tenaga terlatih yang jumlahnya terbatas, tim ini telah berusaha membantu para korban KBG. Mereka terdiri dari 2 orang tenaga pengaduan, satu orang tenaga rehabilitasi sosial (rehabsos) dan 2 orang aparat penegak hukum.

Tabel 9.1 Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Jenis tenaga terlatih untuk pelayanan perempuan & anak korban kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga pengaduan	1		1		2
2	Tenaga rehabsos	0	0	1	100	1
3	Aparat penegak hukum	2	100	0	0	2
4	Tenaga reintegrasi	0		0		0

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Pada tahun 2019 PPT Harapan menangani kasus perempuan dan anak sebanyak 68 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 77 orang, sedangkan korban kekerasan sebanyak 72 orang. Dari 68 kasus yang ditangani di kategorikan menjadi beberapa jenis kasus yaitu seksual, fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan lainnya (pencurian, IT dan lakalantas).

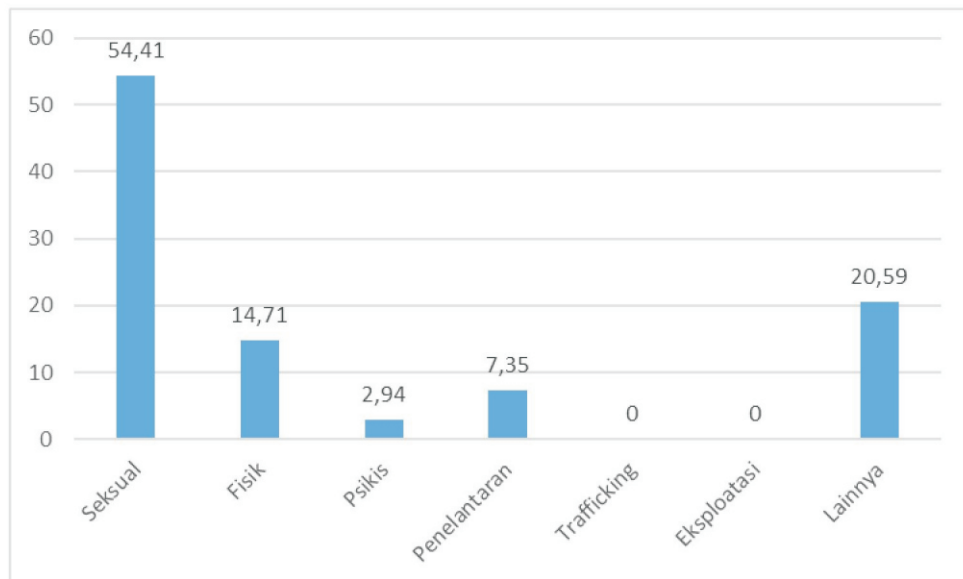
Adapun kasus terbanyak yaitu kasus seksual sebanyak 37 kasus kemudian disusul kategori lainnya 14 kasus.

Tabel 9.2 Jenis kasus yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah	%
	(1)	(2)	(3)
1	Seksual	37	54,41
2	Fisik	10	14,71
3	Psikis	2	2,94
4	Penelantaran	5	7,35
5	<i>Trafficking</i>	0	0,00
6	Eksplorasi	0	0,00
7	Lainnya	14	20,59
Jumlah =		68	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 9.1 Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019



Dari 68 kasus yang ditangani PPT Harapan jumlah pelaku secara keseluruhan yaitu 77 pelaku, hal dikarenakan dalam satu kasus dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang. Dari 77 pelaku terdiri dari 73 orang atau

94,80 persen berjenis kelamin laki laki dan 4 orang atau 5,20 persen berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk pelaku kategori orang dewasa dari 77 orang terdapat 48 orang atau 62,33 persen pelaku dewasa dan 29 orang atau 37,67 persen pelaku anak. Dari 48 orang pelaku dewasa terdapat 44 orang atau 91,67 persen adalah pelaku laki – laki dewasa dan 4 orang atau 8,33 persen pelaku perempuan dewasa. Sedangkan dari pelaku anak sejumlah 29 anak atau 100 persen merupakan pelaku laki laki anak .

Tabel 9.3 Kategori Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2019

No.	Kategori Pelaku	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dewasa	44	91,67	4	8,33	48	62,34
2	Anak	29	100,00	0	0	29	37,66
	Jumlah =	73	94,80	4	5,20	77	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Dilihat dari sisi korban dari 68 kasus terapat 72 korban dengan 23 orang atau 31,94 persen kategori dewasa dan 49 orang atau 68,06 persen kategori anak anak. Korban jenis kelamin laki - laki sebanyak 14 orang atau 19,44 persen, sedangkan korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang atau 80,56 persen. Dari jumlah korban dewasa sebanyak 23 orang, 4 orang atau 17,39 persen merupakan korban laki - laki dewasa sedangkan 19 orang atau 82,61 merupakan korban perempuan dewasa. Sedangkan dari korban anak anak sejumlah 49 anak, sebanyak 10 anak atau 10,41 persen merupakan korban anak laki – laki sedangkan 39 anak atau 79,59 persen merupakan korban perempuan anak

Tabel 9.4 Kategori Korban Kasus yang ditangani Tim Harapan 2019

No.	Kategori Korban	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dewasa	4	17,39	19	82,61	23	31,94
2	Anak	10	20,41	39	79,59	49	68,06
	Jumlah =	14	19,44	58	80,56	72	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Dari kategori korban dewasa sejumlah 23 orang jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban yaitu kekerasan lainnya sejumlah 11 orang atau 47,83 persen, dari jumlah 11 orang korban kekerasan lainnya 4 orang atau 36,36 persen merupakan korban laki – laki dewasa dan 7 orang atau 63,64 persen merupakan korban perempuan dewasa. Kemudian terbanyak kedua jenis kekerasan yang dialami korban dewasa merupakan kekerasan fisik sejumlah 7 orang atau 30,43 persen dan semua korban kekerasan fisik atau 100 persen merupakan korban perempuan dewasa. Kemudian disusul kekerasan seksual sebanyak 3 orang atau 13,04 persen dan korban kekerasan seksual juga 100 persen merupakan korban perempuan dewasa. Dan terendah jenis kekerasan yang dialami oleh korban dewasa yaitu penelantaran 1 orang atau 4,35 persen dan kekerasan psikis juga 1 orang atau 4,35 persen. Dan untuk jenis kekerasan trafficking dan eksploitasi tidak terjadi pada korban dewasa.

Tabel 9.5 Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fisik	0		7	100,00	7	30,43
2	Seksual	0		3	100,00	3	13,04
3	Penelantaran	0		1	100,00	1	4,35
4	Psikis	0		1	100,00	1	4,35
5	<i>Trafficking</i>	0		0		0	0
6	Eksplotasi	0		0		0	0
7	Lainnya	4	36,36	7	63,64	11	47,83
Jumlah =		4	17,39	19	82,6	23	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Dari kategori korban anak sejumlah 49 anak jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban yaitu kekerasan seksul sejumlah 36 anak atau 73,47 persen, dari jumlah 36 anak korban kekerasan seksul 1 anak atau 2,77 persen merupakan korban laki – laki anak dan 35 orang atau 97,23 persen merupakan korban perempuan anak. Kemudian terbanyak kedua jenis kekerasan yang dialami korban anak yaitu kekerasan fisik sejumlah 6 anak atau 12,24 persen, dari korban anak yang mengalami kekerasan fisik 5 anak atau 83,33 persen merupakan korban laki – laki anak dan 1 anak atau 16,67 persen korban perempuan anak. Terbanyak ketiga jenis kekerasan yang di alami korban anak yaitu penelantaran dan kekerasan lainnya masing - masing sebanyak 3 orang atau 6,12 persen, dari 3 orang korban anak yang mengalami penelantaran maupun kekerasan lainnya 2 orang atau 66,67 persen merupakan korban laki – laki anak dan 1 orang atau 33,33 persen merupakan korban perempuan anak. Dan terendah jenis kekerasan yang dialami korban anak yaitu

kekerasan psikis sebanyak 1 orang atau 2,04 persen dan merupakan korban perempuan anak.

Tabel 9.6 Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No.	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	
1	Fisik	5	83,33	1	16,67	6	12,25
2	Seksual	1	2,77	35	97,23	36	73,47
3	Psikis	0		1	100	1	2,04
4	Penelantaran	2	66,67	1	33,33	3	6,12
5	Trafficking	-		-		-	-
6	Eksplotasi	-		-		-	-
7	Lainnya	2	66,67	1	33,33	3	6,12
Jumlah =		10	20,40	39	79,60	49	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Pada kekerasan yang menimpa korban dewasa, kebanyakan kasusnya terjadi di luar rumah tangga dan tempat kerja atau lainnya yaitu sebanyak 13 orang korban dewasa atau 56,52 persen, dari 13 orang korban dewasa sebanyak 4 orang korban laki – laki dewasa atau 30,76 persen dan 9 orang atau 69,23 korban perempuan dewasa. Kemudian disusul tempat kejadian di rumah tangga/KDRT sebanyak 10 orang atau 43,48 persen, sebanyak 10 orang korban yang mengalami kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) merupakan korban perempuan dewasa atau 100 persen. Untuk tempat kejadian kekerasan di tempat kerja tidak dialami oleh korban dewasa.

Tabel 9.7 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Tempat kejadian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah tangga/KDRT	0	0	10	100	10	43,48
2	Tempat kerja	0		0		0	0
3	Lainnya	4	30,76	9	69,23	13	56,52
Jumlah =		4	17,39	19	82,60	23	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2019

Pada korban anak baik perempuan maupun laki-laki, tempat kejadian kekerasan didominasi ada di tempat “lainnya”. Dari 49 korban kekerasan anak sebanyak 43 anak atau 87,76 persen terjadi di tempat lainnya dan dari jumlah 43 korban anak yang terjadi di tempat lainnya sebanyak 9 anak atau 20,93 persen korban laki – laki anak dan sebanyak 34 anak atau 79,07 korban perempuan anak. Tempat kejadian korban kekerasan anak terbanyak kedua di lingkungan Rumah tangga/KDRT yaitu sebanyak 6 anak atau 12,24 persen dari total korban kekerasan anak. Dari 6 anak korban kekerasan dengan tempat kejadian rumah tangga/KDRT, 1 orang atau 16,67 merupakan korban laki – laki anak dan 5 orang atau 83,33 persen korban perempuan anak.

Tabel 9.8 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Tempat kejadian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah tangga/KDRT	1	16,67	5	83,33	6	12,24
2	Tempat kerja	0		0		0	0
3	Lainnya	9	20,93	34	79,07	43	87,76
Jumlah =		10	20,41	39	79,59	49	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

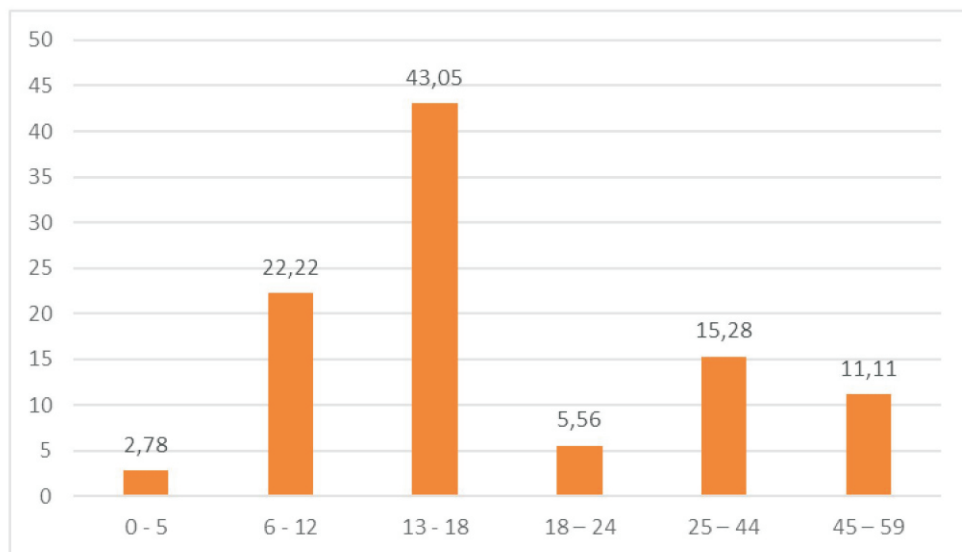
Yang termasuk korban anak yaitu korban dengan umur 0 -18 tahun sedangkan korban dewasa yaitu korban dengan umur 18 tahun ke atas. Dilihat dari sisi umur korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak mereka yang berusia 13 - 18 tahun yaitu 31 orang atau 43,06 persen. Terbanyak kedua korban kekerasan dengan umur 6 -12 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau 22,22 persen. Kemudian disusul korban kekerasan dengan umur 25 – 44 tahun sebanyak 11 orang atau 15,28 persen, korban dengan umur 45 – 49 tahun sebanyak 8 orang atau 11,11 persen, korban dengan umur 18 -24 tahun sebanyak 4 orang atau 5,56 persen dan terendah korban dengan umur 0 – 5 tahun sebanyak 2 orang atau 2,78 persen.

Tabel 9.9 Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Umur Korban (tahun)	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0 - 5	1	50,00	1	50,00	2	2,78
2	6 - 12	5	31,25	11	68,75	16	22,22
3	13 - 18	4	12,90	27	87,10	31	43,05
4	18 - 24	0	0	4	100,00	4	5,56
5	25 - 44	1	9,10	10	90,90	11	15,28
6	45 - 59	3	37,5	5	62,5	8	11,11
Jumlah =		14	19,44	58	80,56	72	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 9.2 Umur korban kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tahun 2019



Dilihat dari hubungan antara pelaku dan korban dewasa, tampak bahwa sebagian besar pelakunya (91,67 persen) adalah laki-laki. Dari sejumlah 22 laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan, sebanyak 11 orang tidak mempunyai hubungan pernikahan ataupun keluargadengan korban sedangkan 8 orang pelaku merupakan pasangan suami istri dengan

korban, 2 orang pelaku mempunyai hubungan orang tua dengan korban dan 1 orang pelaku mempunyai hubungan keluarga dengan korban.

Tabel 9.10 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Hubungan pelaku dengan korban dewasa	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orangtua	2	100	0		2	8,33
2	Suami/istri	8	100	0		8	33,33
3	Keluarga	1	100	0		1	4,17
4	Lainnya	11	83,33	2	16,67	13	54,17
Jumlah =		22	91,67	2	8,33	24	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Sementara itu, pada korban anak 94,44 persen pelakunya adalah laki-laki dan mayoritas memiliki hubungan dengan korban termasuk dalam kategori “lainnya” kemudian disusul dengan hubungan orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Tabel 9.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2019

No.	Hubungan pelaku dengan korban anak	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orangtua	8	72,73	3	27,27	11	20,37
2	Suami/istri	0		0		0	0
3	Keluarga	3	100	0		3	5,56
4	Lainnya	40	100	0		40	74,07
Jumlah =		51	94,44	3	5,56	54	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

BAB X

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa: **pertama**, penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif dimana jumlah laki – lakinya sedikit lebih banyak dibanding dengan perempuan. Dominannya usia produktif ini menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-produktif tua (65 tahun ke atas). Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang kenenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak.

Kedua, kondisi kesehatan ibu hamil di Purbalingga masih belum optimal disebabkan masih adanya kasus ibu berstatus resti dan menderita kekurangan energi kronis. Hal ini dimungkinkan terkait dengan tingkat kunjungan K4 ibu hamil yang belum 100 persen. **Ketiga**, tingkat pendidikan keluarga di Kabupaten Purbalingga pada umumnya masih rendah. Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab masih adanya KK yang tidak mempunyai pekerjaan. Akibatnya, banyak keluarga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera. Sementara itu, partisipasi KB mereka belum mencapai 100 persen. Di antara mereka yang ber-KB,

sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni suntikan dan pil.

Kelima, secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya. Fenomena ini terutama terjadi di kalangan perempuan. Pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu upaya mengejar ketertinggalan pendidikan di kalangan perempuan.

Keenam, di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan. Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga. Keberadaan perempuan juga cukup terlihat pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata.

Ketujuh, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik (baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak, akan tetapi jumlah mereka yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit. Demikian pula dengan di lembaga-lembaga publik lainnya seperti kepolisian dan pengadilan.

Kedelapan, kasus kekerasan yang ditangani Tim Harapan Kabupaten Purbalingga cukup beragam. Kasusnya menimpa baik orang dewasa

maupun anak-anak dan kebanyakan adalah perempuan. Pada korban perempuan, bentuk kekerasannya lebih beragam baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun kekerasan lainnya. Akan tetapi untuk korban perempuan didominasi dengan kasus kekerasan seksual. Adapun pada korban laki-laki didominasi kasus kekerasan fisik. Pada anak-anak (baik perempuan maupun laki-laki), kekerasannya lebih banyak terjadi di dalam rumah tangga maupun “lainnya”. Pada perempuan dewasa, kekerasan lebih banyak dialami oleh mereka yang lebih muda dibandingkan dengan umur korban laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga. 2020. *Purbalingga dalam Angka 2019*. Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga. BPS. *Istilah Kependudukan*. www.bps.go.id/menutahb.php?tab=4&table=1&kat=1&id_subyek=12&12t=1&var. [Akses: 11 Desember 2014].
- Depkes RI. 1996. *Pedoman Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. 2020. *Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019*. Purbalingga: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga. 2019. *Profil Kependudukan Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga.
- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliaan, Flourisa. 2009. *Analisis Lanjutan SDKI Tahun 2007. Unmet need dan Kebutuhan Pelayanan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/glosari/gender> . [Akses: 15 Desember 2014].
- Kementerian PP & Perlindungan Anak. *Visi Misi dan Tujuan*. <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/visimisidantujuan> [Akses: 15 Desember 2015].
- Kementerian PP & Perlindungan Anak. *Press Release Kampanye “He for She” Dorong Keterlibatan Laki-laki dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Siaran Pers Nomor: 159/Humas KPP-PA/12/2015. <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/8perempuan/868-hm>.
- Koalisi Perempuan. <http://www.koalisiperempuan.or.id/kesenjangan-gender>. [Akses: 16 Desember 2014].

Umar, H. Nasaruddin. 2009. *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*. Jakarta: Fikahati Aneska.

VISI, MISI, DAN TUJUAN RPJMD 2016-2021.

(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_229_2016.pdf).

